



**PENGEMBANGAN PARIWISATA SECARA BERKELANJUTAN  
DALAM RANGKA MEMANTAPKAN KETAHANAN EKONOMI  
NASIONAL**

Oleh :

**FRANSISCUS ENGELBERT MANUMPIL  
PEMBINA UTAMA MUDA / IVC NIP. 197301151998071001**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

***Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;  
Salam sejahtera bagi kita semua;  
Namo Buddhaya;  
Om Swastiastu;  
Salam Kebajikan,***

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (TASKAP) dengan judul:

**“PENGEMBANGAN PARIWISATA SECARA BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MEMANTAPKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL”**

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Juni 2020 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXI tahun 2020 Lemhannas.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, S.E dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing untuk membuat serta menyelesaikan Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa penulisan Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai

sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.



## PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransiscus Engelbert Manumpil  
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVC  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP  
Instansi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  
Alamat : Jl. Sam Ratulangi No. 103 Manado

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.

Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya



Jakarta, 4 September 2020

Penulis

Materai 6000

Fransiscus Engelbert Manumpil

## DAFTAR ISI

Halaman

|   |      |
|---|------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | i    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....  | iii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | iv   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....  | vii  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | viii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |      |
| 1. Latar Belakang .....   | 1    |
| 2. Rumusan Masalah .....  | 6    |
| 3. Maksud dan Tujuan .....  | 7    |
| 4. Ruang lingkup dan Sistematika .....  | 8    |
| 5. Metode dan Pendekatan .....  | 9    |
| 6. Pengertian .....   | 9    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>  |      |
| 7. Umum .....   | 12   |
| 8. Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....   | 14   |
| 9. Kerangka Teoritis .....  | 17   |
| 10. Data dan Fakta .....  | 20   |
| 11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis<br>yang Berpengaruh .....                                      | 26   |
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b>   |      |
| 12. Umum .....  | 32   |
| 13. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk<br>Meningkatkan Devisa Negara .....                   | 33   |
| 14. Mewujudkan Sinergi Antara <i>Stakeholders</i> yang<br>Berkepentingan pada Sektor Pariwisata ..... | 40   |
| 15. Meningkatkan Daya Saing Sektor  |      |

|   |    |
|---|----|
| Pariwisata .....  | 45 |
| 16. Pengembangan Sektor Pariwisata Berkelanjutan<br>Berbasis Ekologi..... | 49 |

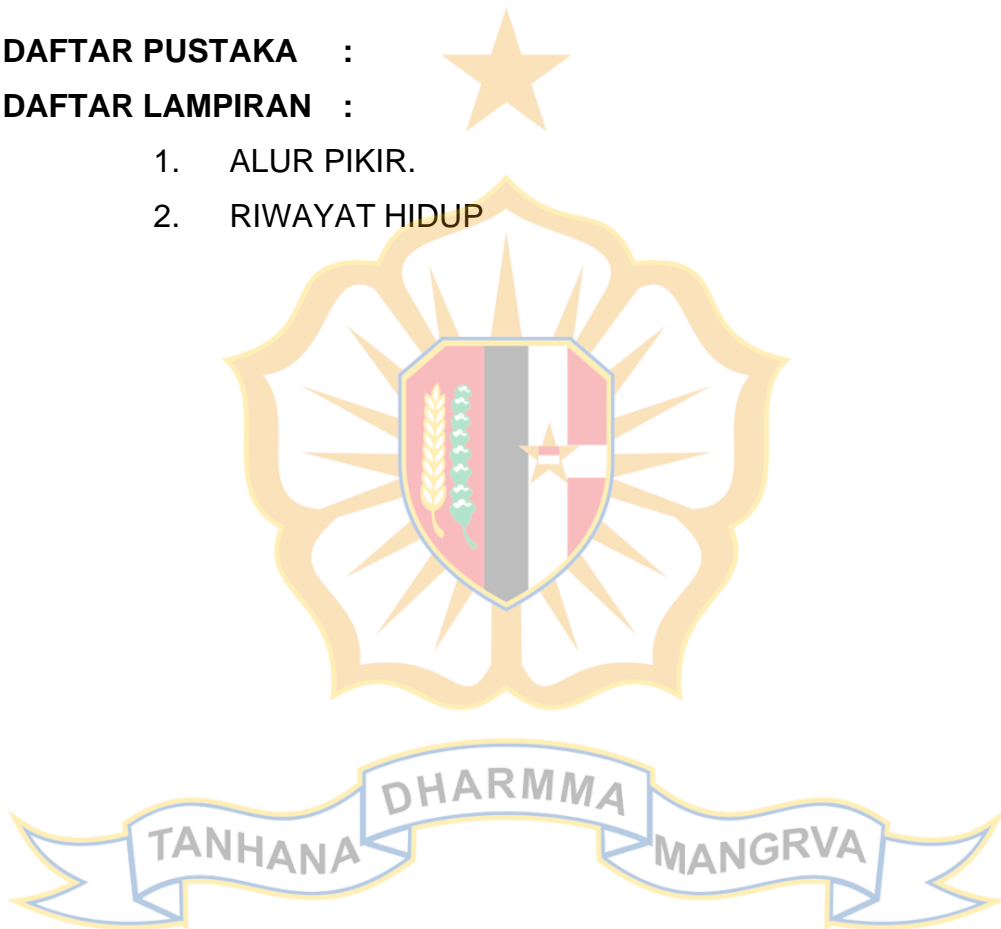
**BAB IV PENUTUP**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 17. Simpulan .....    | 54 |
| 18. Rekomendasi ..... | 55 |

**DAFTAR PUSTAKA :**

**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP



## LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Fransiscus Engelbert Manumpil  
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) –  
LXI Lemhanas RI Tahun 2020.  
Judul Taskap : Meningkatkan Kewaspadaan Nasional  
Pengembangan Pariwisata Secara Berkelanjutan  
Dalam Rangka Memantapkan Ketahanan Ekonomi  
Nasional

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhanas RI Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk di uji.

“”coret yang tidak diperlukan.

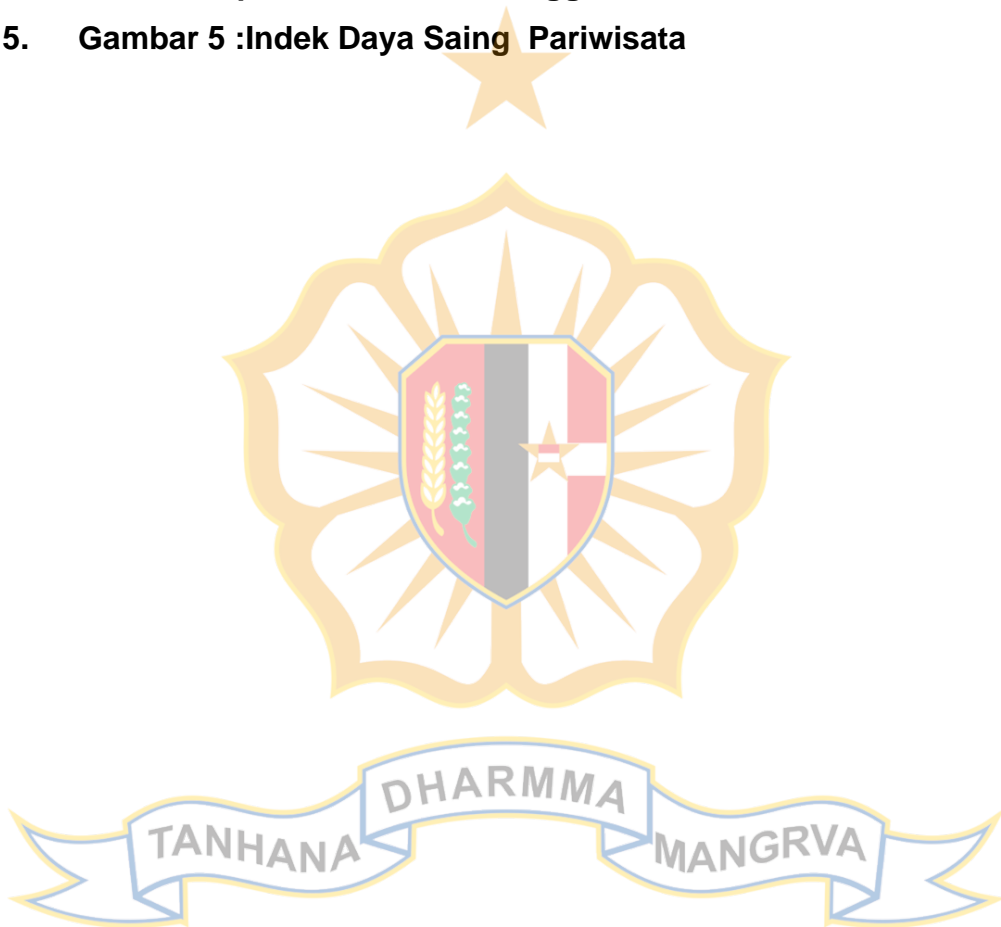
Jakarta, 4 September 2020  
Tutor Taskap



Mayjen TNI (Purn) Imam Maksudi, S.E.  
Taprof Bidang Geopolitik dan Wasantara Lemhannas RI

## DAFTAR GAMBAR

|  | Hal |
|--|-----|
| 1. Tabel 1 : Tingkat kunjungan wisatawan Ke Indonesia  | 22  |
| 2. Tabel 2 : Tingkat Penerimaan Devisa Sektor Pariwisata                                     | 22  |
| 3. Tabel 3: Tingkat kunjungan wisatawan Ke negara2 Asean                                     | 23  |
| 4. Tabel 4 : Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2009 hingga 2018 | 24  |
| 5. Gambar 5 :Indek Daya Saing Pariwisata   | 25  |





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Salah satu amanat Pembukaan UUD Negara RI 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum, terutama melalui upaya pembangunan nasional yang dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya dengan mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya mewujudkan ketahanan nasional adalah dengan meningkatkan devisa atau penerimaan negara serta melalui penguatan ekonomi masyarakat, sebagai negara yang dianugerahi berbagai potensi SKA dan keindahan alamnya sudah barang tentu dapat dimanfaatkan sekaligus dikembangkan melalui industri pariwisata yang mampu memberikan nilai devisa yang cukup besar bagi perekonomian nasional.

Ketahanan ekonomi dimaknai sebagai kondisi kehidupan ekonomi bangsa yang dinamis yang mengandung ketahanan dan ketahanan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negara baik secara langsung dan secara tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi ketahanan ekonomi nasional adalah ketahanan yang dapat tercermin dari kondisi kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara yang mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas ekonomi yang baik, sehat dan dinamis serta kemampuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dengan tingkat kemandirian yang memiliki daya saing tinggi dan menciptakan kemakmuran yang adil dan merata bagi rakyat. Di sisi lain, pembangunan ekonomi adalah untuk mendukung ketahanan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan barang dan jasa, pemeliharaan fungsi lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing dalam lingkup persaingan global.

Terwujudnya ketahanan ekonomi nasional dapat dilakukan melalui beberapa sektor seperti sektor migas, pertanian, industri, kelautan, pariwisata dan sektor lainnya. Salah satu sektor yang menopang ketahanan ekonomi dari sisi ekonomi kreatif adalah sektor pariwisata yang dapat berkontribusi pada saat perekonomian lesu.

Oleh karenanya sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) memiliki ciri khas dengan konfigurasi geografi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dengan pulau-pulau besar dan kecil, sekitar 17.500 pulau dengan luas wilayah sekitar 7,7 juta km<sup>2</sup>. Dua per tiga dari luas wilayah tersebut; 5,8 juta km<sup>2</sup> terdiri dari lautan, dengan sisanya seluas 1,9 juta km<sup>2</sup> merupakan daratan. Dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 81.000 km.

Diketahui Indonesia memiliki wilayah yang luas, kaya akan sumber daya alam, jejak sejarah dan keanekaragaman budaya yang unik. Memiliki unsur-unsur keindahan alam (*natural beauty*), keaslian (*originality*), kelangkaan (*scarcity*), dan keutuhan (*wholeness*) dan diperkaya dengan kekayaan alam berupa keanekaragaman flora dan fauna, ekosistem, serta gejala alam yang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata.

Selain potensi alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya Indonesia memiliki ribuan pulau dengan ciri khas tersendiri, keanekaragaman hayati dan keindahan alam yang dimiliki oleh tiap daerah merupakan suatu anugerah Tuhan dan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan. Keseluruhan potensi obyek dan daya tarik alam yang tersebut di atas merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan dan perusahaan yang benar dan terkoordinasi baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata.

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 pasal 1 definisi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pariwisata adalah fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang mensyaratkan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan biasanya untuk keperluan pribadi atau bisnis/profesional.<sup>1</sup>

Daerah tujuan wisata yang akan dikembangkan menjadi suatu obyek wisata diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang berkualitas termasuk menciptakan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara, penerimaan devisa juga ikut meningkat.

Pembangunan berkelanjutan semakin menjadi isu prioritas dalam pembangunan pariwisata di dunia modern. Pariwisata telah memberikan kontribusi besar bagi ekonomi dalam hal pengentasan kemiskinan, pertumbuhan pendapatan, penyerapan lapangan kerja dan pembangunan daerah. Namun, keberhasilannya yang terus menerus menghadapi sejumlah tantangan, seperti kerusakan lingkungan, kebocoran pendapatan pariwisata, manfaat yang didistribusikan secara tidak merata diantara yang kaya dan yang miskin, bencana buatan manusia dan alam, dan perubahan iklim.

Selain itu, telah diperdebatkan bahwa perluasan kegiatan pariwisata dan wisata sebagian bertanggung jawab atas penipisan sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Kapera (2018) melaporkan bahwa masih adanya konflik terkait dengan kolaborasi di sektor pariwisata, dan sebagian besar dimanifestasikan oleh perbedaan pendapat dalam hal perlindungan lingkungan versus pengembangan pariwisata. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah konflik akan lebih kecil bila kualitas dari kolaborasi antar pemangku kepentingan makin tinggi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> United Nation World Tourism Organization. "Glossary of Tourism Terms". Dalam <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms>. 11 Mei 2020.

<sup>2</sup> Kapera, I. (2018) Sustainable tourism development efforts by local governments in Poland. *Journal of Sustainable Cities and Society*, Volume 40, 581-588.

Sektor pariwisata yang tumbuh sangat pesat memiliki dampak berganda (*multiplier effect*) yang mana kemanfaatannya mampu dirasakan hingga ke lapisan masyarakat. Akan tetapi pengelolaan pariwisata yang tidak baik, justru akan menyebabkan persoalan baru, seperti dislokasi sosial, kuatnya pengaruh kultur atau budaya asing, hilangnya warisan budaya, ketergantungan ekonomi, hingga kerusakan ekologis. Mengacu kepada hal tersebut maka, sudah mulai banyak pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki kesadaran untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan atau *sustainable* bahkan menjadi trend global.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata pendapatan devisa dari sektor pariwisata pada 2015 mencapai US\$ 12,23 miliar atau setara Rp 169 triliun. Kemudian pada 2019, pendapatan devisa dari pariwisata ditargetkan sebesar US\$ 20 miliar dan menjadi yang terbesar mengalahkan hasil ekspor sawit maupun migas.<sup>3</sup>

Dengan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia dan berkaca dari pula dewata sebagai destinasi wisata internasional maka sektor swasta menjadi salah satu sektor unggulan bahkan menjadi sektor yang memiliki kontribusi besar dalam mendorong pendapatan atau devisa Indonesia hingga mengalahkan sektor lainnya.

Berdasarkan laporan internasional indeks daya saing pariwisata Indonesia versi World Economic Forum (WEF) naik dari peringkat 42 menjadi ke 40.<sup>4</sup> Akan tetapi meskipun terjadi peningkatan industri pariwisata Indonesia masih di bawah Thailand, Singapura dan Malaysia, oleh karena pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan industri pariwisata perlu terus meningkatkan daya saing global bagi sektor industri pariwisata.

Disisi lain upaya peningkatan industri pariwisata nasional belum disertai dengan pengelolaan lingkungan atau ekologis yang baik atau

---

<sup>3</sup> Berapa pendapatan sektor pariwisata Indonesia 2018. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/10/berapa-pendapatan-devisa-dari-sektor-pariwisata-indonesia>. (diakses tanggal 3 oktober 2020)

<sup>4</sup> <https://travel.kompas.com/read/2019/09/06/114334127/menpar-sumringah-posisi-indonesia-di-peringkat-pariwisata-dunia-naik?page=all> (diakses tanggal 3 oktober 2020)

berbasis lingkungan sehingga dampak kerusakan ekologis atau lingkungan terus meningkat.

Upaya mewujudkan sektor pariwisata yang berkelanjutan seperti yang dipogramkan oleh Kementerian Pariwisata dengan menerapkan program *Sustainable Tourism for Development (STDev)* yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar internasional dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC), dimana pariwisata berkelanjutan mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang lebih dikenal dengan 3P + 1M, yaitu *People, Planet, Prosperity, dan Management*.<sup>5</sup>

Bahkan adanya privatisasi dan industrialisasi pariwisata bukan saja berdampak pada kehidupan masyarakat namun berdampak juga pada kualitas lingkungan sekitar tempat pariwisata. Merujuk pada pemberitaan (Tempo, 2011), terjadi abrasi akibat adanya pembabatan hutan bakau, kerusakan terumbu karang, dan pembangunan di sepanjang pantai.

Kerusakan lingkungan tersebut akibat korporasi yang mengembangkan pariwisata tanpa melihat keadaan lingkungan hidup. Selain itu, buruknya lingkungan wisata diakibatkan oleh wisatawan yang datang dan merusak lingkungan secara aktif seperti membuang sampah tentunya dapat merusak ekosistem pesisir tempat wisata<sup>6</sup>. Pengembangan pariwisata berkelanjutan harus memenuhi aspek ekologi, aspek ekonomis, aspek sosial budaya.

Dari aspek ekologi, kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber kekayaan alam merupakan syarat dalam mewujudkan pembangunan serta pariwisata keberlanjutan ketersediaan sumber kekayaan alam yang dapat diperbahruai ataupun tidak keberadaanya semakin terbatas oleh sebab itu perlu upaya untuk menjaga dan melestarikan sebagai upaya

---

<sup>5</sup> <https://ekbis.sindonews.com/berita/1388557/34/indonesia-adopsi-standar-global-dalam-program-pariwisata-berkelanjutan>

<sup>6</sup>Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS), Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan Pesisir, diakses dari file:///C:/Users/SULTHA~1/AppData/Local/Temp/586-83-PB.pdf.



mendukung berkelanjutan sekaligus melestarikan sehingga mampu mewujudkan pembangunan dan pariwisata yang berkelanjutan.

Begitu juga aspek sosial budaya perlunya menjaga kelestarian budaya nilai dan norma serta kearifan local sebagai bagian dari budaya sekaligus identitas bangsa untuk dapat dijaga dan dilestarikan terutama dihadapkan dengan kuatnya pengaruh budaya global baik budaya asing, sehingga kelestarian dan keberlanjutan nilai sosial budaya serta norma dapat terjaga dari berbagai pengaruh asing yang begitu deras masuk terutama melalui media elektronik khususnya melalui media sosial serta asimilasi budaya yang terjadi melalui pariwisata

Peraturan Presiden RI nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas membuka peluang pengembangan destinasi yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pemerintah mendorong penyiapan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi pariwisata prioritas lainnya, karena sampai saat ini pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali sekitar 41% (Perpres 18/2020). Manfaat dari pengembangan destinasi prioritas baru yaitu memberikan kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 5,5% (2024); meningkatnya devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024); dan meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan (2024) dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024).

## 2. Rumusan Masalah

Dengan potensi wisata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memungkinkan peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor pariwisata. Meskipun demikian, sektor pariwisata sangat rentan terhadap faktor-faktor lingkungan alam, keamanan, dan aspek lingkungan strategis lainnya.

Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi

sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan.

Dilain pihak, pengembangan pariwisata yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas ternyata dapat menimbulkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan, serta berdampak terhadap aspek sosial dan budaya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pertanyaan kajian dalam penulisan Taskap ini adalah **“Bagaimana pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional?”**

Mengacu kepada berbagai dampak persoalan di atas, maka terdapat sejumlah pertanyaan kajian yang harus ditelaah lebih lanjut, yaitu:

- a. Bagaimana pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan Devisa Negara?
- b. Bagaimana mewujudkan sinergi antara *Stakeholders* yang berkepentingan pada sektor pariwisata?
- c. Bagaimana pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan berbasis ekologi?
- d. Bagaimana meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia di tingkat Regional dan global?

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud.

Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam mendukung perekonomian nasional serta analisis persoalan yang dihasilkan untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

#### b. Tujuan.

Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang pariwisata berkelanjutan, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan, dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat

meningkatkan industri pariwisata berkelanjutan yang berkontribusi bagi ketahanan ekonomi nasional.

#### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

##### a. Ruang Lingkup.

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan ini dibatasi pada pembahasan menyangkut aspek ekonomi, aspek ekologi dan aspek sinergi stakeholders untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan.

##### b. Sistematika.

Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut:

##### 1) Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini akan membahas kondisi umum yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan sebagai uraian latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

##### 2) Bab II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini akan dijelaskan landasan pemikiran yang menjadi dasar untuk memberikan arah kajian taskap ini, khususnya menyangkut, regulasi atau Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku. Kemudian data dan fakta yang berkaitan serta menunjang pembahasan serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah sebagai pisau analisis dari tulisan ini serta berbagai pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik global, regional dan nasional yang berpengaruh terhadap.



### 3) Bab III Pembahasan.

Pada bab ini akan dianalisis secara detail setiap pokok-pokok bahasan terkait pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

### 4) Bab IV Penutup.

Bab ini merangkum keseluruhan naskah ini, berisi simpulan sebagai sintesis dari paparan bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban atas permasalahan yang muncul di dalam penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

## 5. Metode dan Pendekatan

### a. Metode.

Penyusunan tulisan ini dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan yaitu deskriptif analisis. Dengan disertai kajian kepustakaan dari data sekunder dan/atau data primer.

### b. Pendekatan.

Pembahasan masalah ini dengan menggunakan pendekatan komprehensif, integral dan holistik dengan menggunakan perspektif ketahanan nasional.

## 6. Pengertian

Agar supaya lebih memahami kajian Taskap ini maka kiranya diperlukan penyamaan persepsi terhadap beberapa istilah yang ada sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami adapun beberapa pengertian istilah tersebut antara lain:

- a. **Pengembangan**, proses, cara, perbuatan mengembangkan atau menjadikan lebih berkembang.<sup>7</sup>
- b. **Pariwisata** adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah<sup>8</sup>
- c. **Pariwisata berkelanjutan** adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.<sup>9</sup>
- d. **Memantapkan** Menjadikan teguh (tetap hati, kukuh); meningkatkan; mengukuhkan: *majelis ini akan lebih - rencana perbaikan ekonomi;* 2 menjadi tetap (tidak berubah; tidak goyah); menjadikan stabil.
- e. **Ketahanan Ekonomi.** adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.<sup>10</sup>
- f. **Daya saing.** kemampuan makhluk hidup untuk dapat tumbuh (berkembang) secara normal di antara makhluk hidup lainnya sebagai pesaing dalam satu habitat (dalam satu bidang usaha dan sebagainya).<sup>11</sup>

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/perkembangan>

<sup>8</sup> Undang-undang RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

<sup>9</sup> [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/27853e1951c3f72a0e6e8a0be2a9ed30.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/27853e1951c3f72a0e6e8a0be2a9ed30.pdf)

<sup>10</sup> <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2488>

<sup>11</sup> <https://kbbi.kata.web.id/daya-saing>

- g. **Ekologi** adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya); cabang ekologi tentang pengembangan ekosistem yang dapat melakukan regenerasi sebagian atau seluruhnya untuk menyokong kehidupan manusia selama penerbangan ruang angkasa yang lama.<sup>12</sup>
- h. **Global Sustainable Tourism Council (GSTC)** adalah badan independen internasional yang menetapkan dan mengelola standar pariwisata global dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pariwisata berkelanjutan dan praktek antara para pemangku kepentingan publik dan swasta.



---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/ekologi>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum

Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata berkelanjutan telah menjadi salah satu subjek terpenting kalangan akademisi dan praktisi. Pembangunan pariwisata berkelanjutan telah menarik perhatian yang signifikan dalam banyak bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam studi pariwisata dan telah menjadi salah satu subjek yang berkembang sangat cepat penelitian studi pariwisata sejak akhir 1980-an. Menurut Buckley (2012) secara spesifik istilah 'pariwisata berkelanjutan' pertama kali digunakan hampir dua dekade lalu. Hal ini terkait dengan kerangka dasar pariwisata, ekonomi dan lingkungan manajemen dipelajari<sup>13</sup>.

Menurut Bramwell & Lane (2012), dalam industri pariwisata, pariwisata berkelanjutan muncul sebagian sebagai konsep negatif dan reaktif dalam menanggapi banyaknya masalah kepariwisataan, seperti kerusakan lingkungan dan dampak serius pada masyarakat dan tradisional budaya. Dilain pihak, pembangunan pariwisata dipandang sebagai sebuah solusi yang mampu menciptakan perubahan positif melalui gagasan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan telah memainkan peran penting dalam mengidentifikasi cara untuk mendapatkan hasil manfaat yang positif, serta pendekatan yang mapan dari regulasi dan pengendalian pembangunan.

Industri pariwisata berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, terutama dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini industri perjalanan dan pariwisata ditempatkan di antara industri terbesar di dunia. Namun, dampak pariwisata telah menjadi perhatian besar dan perlu diwaspadai ditangani dengan cepat. Konsep pariwisata berkelanjutan telah muncul dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pariwisata yang telah diterima secara universal

---

<sup>13</sup> Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 39, 528–546.

sebagai pendekatan pariwisata yang diinginkan dan sesuai dengan perencanaan yang berkelanjutan untuk ketahanan ekonomi. Keberlanjutan mencakup semua unsur yang merupakan pengalaman wisata yang lengkap. Pembangunan pariwisata berkelanjutan menyangkut ekonomi, sosial dan lingkungan pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan wisatawan secara terus menerus.

Ketahanan Nasional di bidang ekonomi dapat dilihat dari berbagai kondisi kehidupan ekonomi suatu bangsa yang dapat memasuki kemerdekaan ekonomi. Dalam ketahanan ekonomi, aspek ekonomi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi, yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa sehingga dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau kelompok. Pembangunan ekonomi difokuskan pada ketahanan ekonomi yang stabil melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan dinamis serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, barang dan jasa yang tersedia, serta peningkatan daya saing dalam lingkup persaingan ekonomi global.

Aspek kehidupan bangsa yang terintegrasi mengandung ketangguhan dan ketangguhan yang mengandung banyak kemampuan dalam membangun kekuatan bangsa dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun tidak langsung. Kemandirian ekonomi juga memiliki arti yang baik dimana setiap manusia dapat menciptakan kreatifitas yang produktif karena pembangunan ekonomi mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk berkarya. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya selalu memperhatikan keseimbangan nusantara.

Sebagaimana diketahui bahwa ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan bangsa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat secara individu dan kelompok serta cara-cara yang digunakan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi sangat berpengaruh akibat keterlibatan langsung dengan masyarakat, contohnya adalah ketahanan nasional di bidang pangan, dengan perekonomian yang baik, tentunya suatu negara tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya. Kelaparan tidak akan terjadi dan kemiskinan terhambat bisa dikurangi. Selain itu, suatu negara akan sangat mudah menerapkan teknologi baru pada sistem pertaniannya jika negara tersebut sehat secara ekonomi.

Ketahanan ekonomi nasional merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan banyak dimensi, diantaranya: 1) Stabilitas ekonomi; 2) Tingkat integritas ekonomi; 3) Ketahanan ekonomi sistem terhadap guncangan dari luar sistem ekonomi; 4) Margin keamanan dari garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi; 5) Keunggulan produk kompetitif perekonomian nasional; 6) Stabilitas ekonomi dari perspektif perekonomian nasional; 7) Derajat keterpaduan perekonomian nasional dengan perekonomian global. Ekonomi kreatif telah menggemakan konsep menjadi perekonomian yang memiliki kekuatan dan kemerdekaan. Faktor-faktor yang mendukung ketahanan di Sektor Ekonomi khususnya perekonomian di Indonesia sangat dibutuhkan yaitu: a) Sumber daya alam melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara menjadikan Indonesia negara dengan struktur ekonomi agraria dan negara maritim, kekuatan yang ada dalam sumber daya alam sangat membantu dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dimana negara tidak lagi memberikan harapan kepada bahan baku sehingga pembangunan industri menjadi maju dan berkembang. b) Tenaga kerja, dengan pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang dapat menjadi sumber tenaga kerja yang perlu ditingkatkan keahlian dan keterampilan ilmu dan teknologi.

## **8. Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Faktor utama yang sangat menentukan didalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan adalah kepastian hukum yang ada. Adanya



kepastian dan jaminan hukum akan mampu mendukung terwujudnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

**a. Undang-undang RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**

Pembangunan dibidang kepariwisataan sangat diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global yang ada saat ini dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional sehingga membuat Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti.

Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan tuhan, hubungan manusia dan manusia dan hubungan manusia dan lingkungan. Adapun dalam pasal ini juga terutama sub pasal ( c dan d) diamanatkan bahwa kepariwisataan harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang diantaranya dengan memberdayakan masyarakat di daerah wisata serta tetap memperhatikan dan memelihara kelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian dari upaya pelestarian ekologi dalam sektor pariwisata berkelanjutan.

Upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan juga telah diamanatkan dalam UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan terutama pasal 25 dimana wisatawan memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, kemudian memelihara sekaligus melestarikan lingkungan.

**b. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.**

Sebagai upaya mengatur secara teknis serta melaksanakan ketentuan Undang-undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan sehingga dirasakan perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah yang mengatur rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010 – 2025. Pada pasal 2 ayat (8) dijelaskan bahwa Arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan kepariwisataan nasional yang dilaksanakan dengan didasarkan atas prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan, kemudian berorientasi kepada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, disertai dengan tata kelola yang baik yang dilakukan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku.

Adapun maksud dari dilaksanakan secara terpadu adalah diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karenanya PP No 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional.

**c. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Th 2014**

Peraturan ini disusun sebagai upaya untuk mendukung industri pariwisata terutama dalam mendukung berbagai usaha perjalanan pariwisata agar memiliki standar mutu yang baik serta perlindungan bagi pengusaha industri pariwisata sekaligus wisatawan.

Permenparekraf No 4 Th 2014 berisi Tentang standar usaha perjalanan wisata, dimana Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi:

- 1) Biro Perjalanan Wisata
  - usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan
  - usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk perjalanan ibadah



## 2) Agen Perjalanan Wisata

- jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi
- pengurusan dokumen perjalanan

Pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan, maka perlu memperhatikan kode etik pengembangan pariwisata seperti yang ditetapkan dalam konferensi pariwisata tahun 1999 yang mengatur etika global pariwisata untuk menjamin sumberdaya alam yang menjadi sumber kehidupan kepariwisataan dan melindungi lingkungan dari dampak buruk kegiatan bisnis pariwisata, dimana kode etik tersebut meliputi : kewajiban pemerintah, kewajiban dan hak usaha pariwisata, kewajiban dan hak masyarakat.

Pentingnya pariwisata untuk pembangunan berkelanjutan dan perlunya pariwisata untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan telah semakin diakui dalam forum internasional dan digemakan dalam pernyataan kebijakan.

## 9. Kerangka Teoritis

Adapun landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan naskah ini antara lain:

### a. Teori Manajemen

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu serangkaian aktivitas yang kompleks bertujuan untuk mengarahkan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan kolektif secara efektif dan efisien dalam waktu tertentu. Proses manajemen melibatkan empat aktivitas dasar, yakni: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian kelompok (Organizing), Aktualisasi atau mewujudkan visi yang telah direncanakan (Actuating), serta Pengendalian dan Pengawasan (Controlling).

Proses tersebut harus dilakukan secara terus menerus untuk memastikan agar tujuan organisasi dapat terus tercapai tanpa kecacatan di keseluruhan proses pengelolaannya. Teori tersebut terkait dengan pengembangan Pariwisata secara berkelanjutan

karena pariwisata berkelanjutan memerlukan proses dan tahapan manajemen dari mulai perencanaan setiap aspek hingga matang termasuk aspek ekologi serta evaluasi sebagai strategi agar mencapai kesuksesan secara efektif dan efisien.

Pariwisata berkelanjutan perlu direncanakan dengan melihat kepentingan nasional dalam lingkungan strategis. Sementara itu, pengorganisasian dan pengelolaan juga perlu dilakukan baik di *stakeholders* maupun para wisatawan. Pariwisata berkelanjutan yang baik juga perlu diaktualisasikan dan diawasi agar dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan.

**b. Teori Pembangunan Berkelanjutan. (Sudharta P. Hadi dalam bukunya yang berjudul "Opcit" tahun 2007).**

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris sering disebut *sustainable development* merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.<sup>14</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) lahir karena eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Konsep ini terdiri dari tiga pilar utama yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut harus berjalan secara harmonis

Pada tahun 1987, Komisi Sedunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai konsep dalam pengelolaan lingkungan hidup<sup>15</sup>. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan secara berkelanjutan bahwa, lingkungan dan pembangunan masa kini

<sup>14</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/15514/3/TS150202.pdf>

<sup>15</sup> World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future*. Oxford:Oxford University.

diperlukan tindakan-tindakan baru yang menjamin keberlanjutan dunia untuk masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka”<sup>16</sup>.

Pembangunan berkelanjutan berarti merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. Dengan demikian, dalam upaya untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan kota dan wilayah yang berorientasi *market driven* (ekonomi), dimensi sosial, lingkungan dan budaya sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan.

**c. Teori Sinergitas (Najianti dalam Rahmawati et al. 2011)<sup>17</sup>**

Sinergitas antara aktor kepentingan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Tak ubahnya keilmuan administrasi publik yang menganggap administrasi sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, sinergitas juga merupakan kombinasi atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama stakeholders yang ada didalamnya (Najianti dalam Rahmawati et al. 2011).

Berdasarkan hal tersebut sinergitas memposisikan dirinya sebagai katalisator dari keilmuan administrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal. Sinergitas dapat terbangun melalui komunikasi dan koordinasi.

<sup>16</sup> Soemarwoto, Otto. 2001. *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

<sup>17</sup> Akbar Pandu Dwinugraha sinergitas aktor kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa file:///C:/Users/SULTHA~1/AppData/Local/Temp/1421-3675-2-PB-2.pdf

Disamping komunikasi, sinergitas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Dalam keilmuan administrasi publik, konsep sinergitas merupakan suatu cara yang harus dilakukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan masyarakat

Sinergitas dalam pemerintahan merupakan koordinasi antar aparat pemerintah dalam meningkatkan hubungan pemerintah dan pemerintahan daerah melalui implementasi nilai-nilai Pancasila akan memunculkan berbagai macam pola yang berbeda bila dihadapkan pada kepentingan masing-masing komponen bangsa. Dalam teori sinergitas dikenal tiga pola yang meliputi;

- 1) Defensif. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang rendah akan mengakibatkan pola hubungan komunikasi yang bersifat pasif/ defensif.
- 2) Respectful. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yang meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi saling menghargai.
- 3) Synergistic. Dengan kerjasama yang tinggi serta saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas (simbiosis mutualisme) yang berarti bahwa kerjasama yang terjalin akan menghasilkan output yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak.

## 10. Data dan Fakta

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa isu utama pariwisata berkelanjutan telah diformulasikan dalam beberapa literatur penelitian. Bagaimana cara memformulasikan masalah pariwisata berkelanjutan dalam istilah teoretis yang luas dan bagaimana kita mengembangkan kebijakan terkait (Harding & Blokland 2014).

Penelitian dari Hall (2011) yang menganalisis pariwisata berkelanjutan, dan sistem tata kelola pariwisata berkelanjutan, melalui

konsep pembelajaran kebijakan dan kegagalan. Hasilnya, pariwisata berkelanjutan menghadirkan sebuah paradoks. Di satu pihak, pariwisata berkelanjutan berhasil dengan konsep difusi antara industri, pemerintah, akademisi dan pelaku kebijakan. Namun, dipihak lain merupakan kegagalan kebijakan mengingat dampak lingkungan pariwisata yang terus bertumbuh secara absolut.

Munculnya keresahan tentang bagaimana penelitian dan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang seringkali lebih berkonsentrasi pada memahami dan mengubah sikap, perilaku individu, dengan mengorbankan pemahaman hubungan sosial yang lebih luas dan struktur sosial, termasuk sistem yang sudah ada. Hall (2011) berpendapat bahwa paradigma dominan pada perspektif ilmu sosial untuk pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, kecenderungan terkait dengan beberapa peneliti untuk mendorong pariwisata yang lebih berkelanjutan melibatkan sistem produksi dan konsumsi yang luas.

Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata internasional sudah seharusnya mampu mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan yang berbasis ekologi, destinasi wisata yang begitu banyak perlu dikembangkan agar mampu go internasional serta memiliki daya saing dengan negara-negara lain, saat ini destinasi wisata yang sangat terkenal di dunia dan dimiliki Indonesia adalah pulau dewata atau Bali, gili trawangan, raja ampat dan bunaken.

Tingkat kunjungan wisata ke beberapa daerah tersebut telah memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara melalui devisa bahkan setiap tahun kunjungan wisata baik mancanegara maupun lokal terus meningkat.

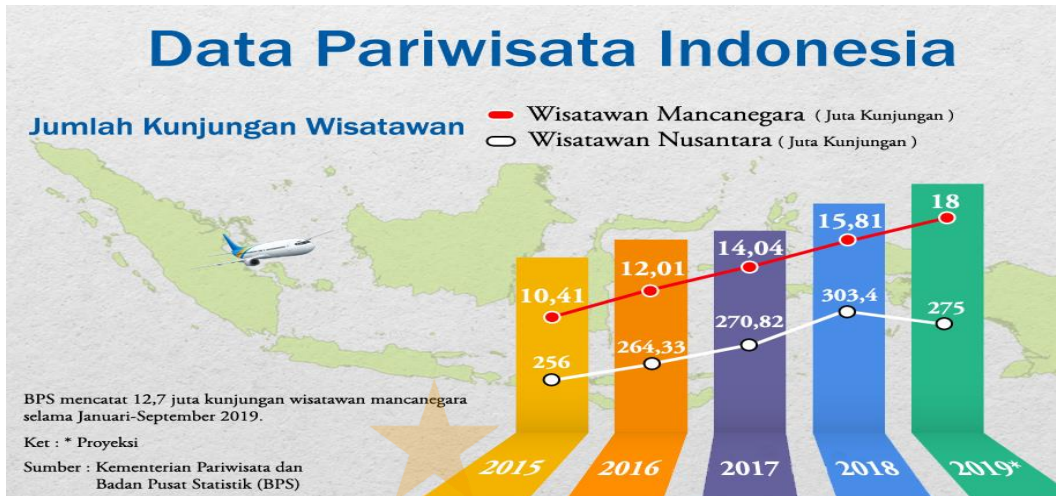
kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat sejak 2015 hingga 2019. Akan tetapi target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 2019 tidak tercapai. Sampai September 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya 12,7 juta kunjungan wisman dari target 18 juta.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> <https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/gaya-hidup/585877/pacu-dunia-pariwisata> diakses tanggal 4 Oktober 2020



**Tabel 1 : Tingkat Kunjungan Wisatawan ke Indonesia**



Selain target kunjungan wisman yang melenceng dari target yang ditentukan, target devisa sebesar US\$ 20 miliar juga kemungkinan tidak tercapai. Kondisi tersebut membuat industri pariwisata Indonesia tertinggal dibanding negara-negara ASEAN, seperti Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data World Tourism Organization, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Malaysia mencapai 21,77 juta dengan total belanja US\$ 25,83 miliar. Thailand, pada 2017 mencatat jumlah kunjungan wisman 62,15 juta dengan total belanja US\$ 35,59 miliar.

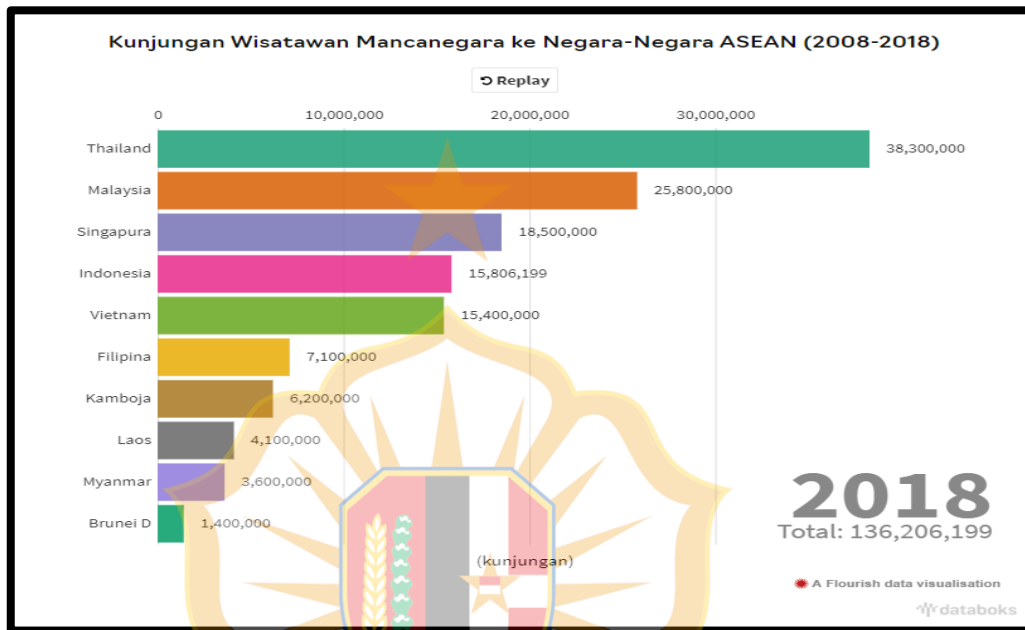
**Tabel 2 : Tingkat Penerimaan Devisa Sektor Pariwisata**



Sumber: Databoks

Di tengah berbagai konflik yang ada khususnya di laut China Selatan, tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan asia tenggara masih didominasi oleh Thailand, sedangkan Indonesia berada di posisi ke 4 di bawah Malaysia berikut gambarannya:

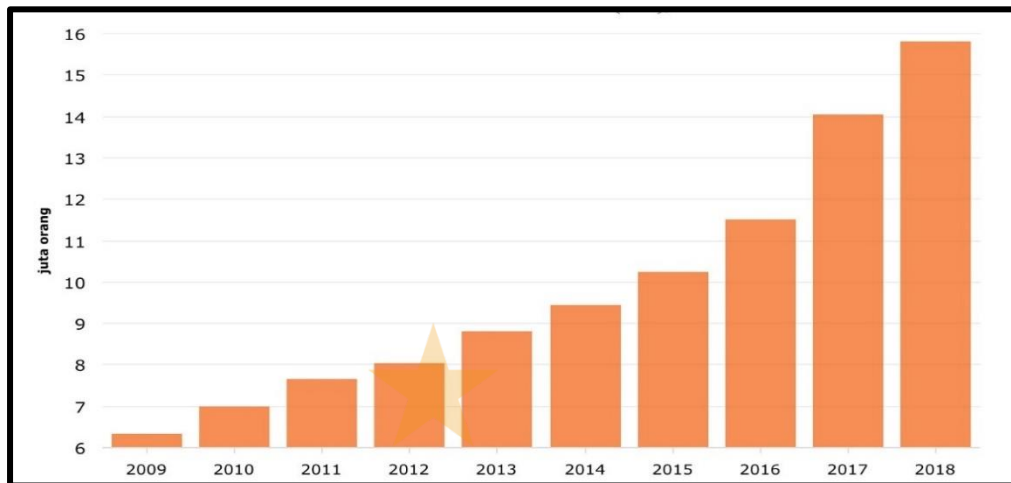
**Tabel 3: Tingkat kunjungan wisatawan Ke negara2 Asean**



Dalam setengah dekade terakhir, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Angka kunjungan ini tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan devisa di Indonesia. Pada tahun 2017, pariwisata Indonesia menempati urutan kedua sebagai penyumbang devisa negara setelah sektor kelapa sawit dengan nilai USD 16,8 miliar.

Meskipun demikian kenaikan, ternyata tidak semua masyarakat di Indonesia menikmati dampak ekonomi dari pariwisata. Pengembangan kepariwisataan yang terkonsentrasi pada destinasi wisata prioritas, ditambah dengan adanya istilah 10 Bali Baru menyebabkan banyak ketimpangan yang terjadi di daerah yang bukan menjadi prioritas.

**Tabel 4 : Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2009 hingga 2018<sup>19</sup>**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

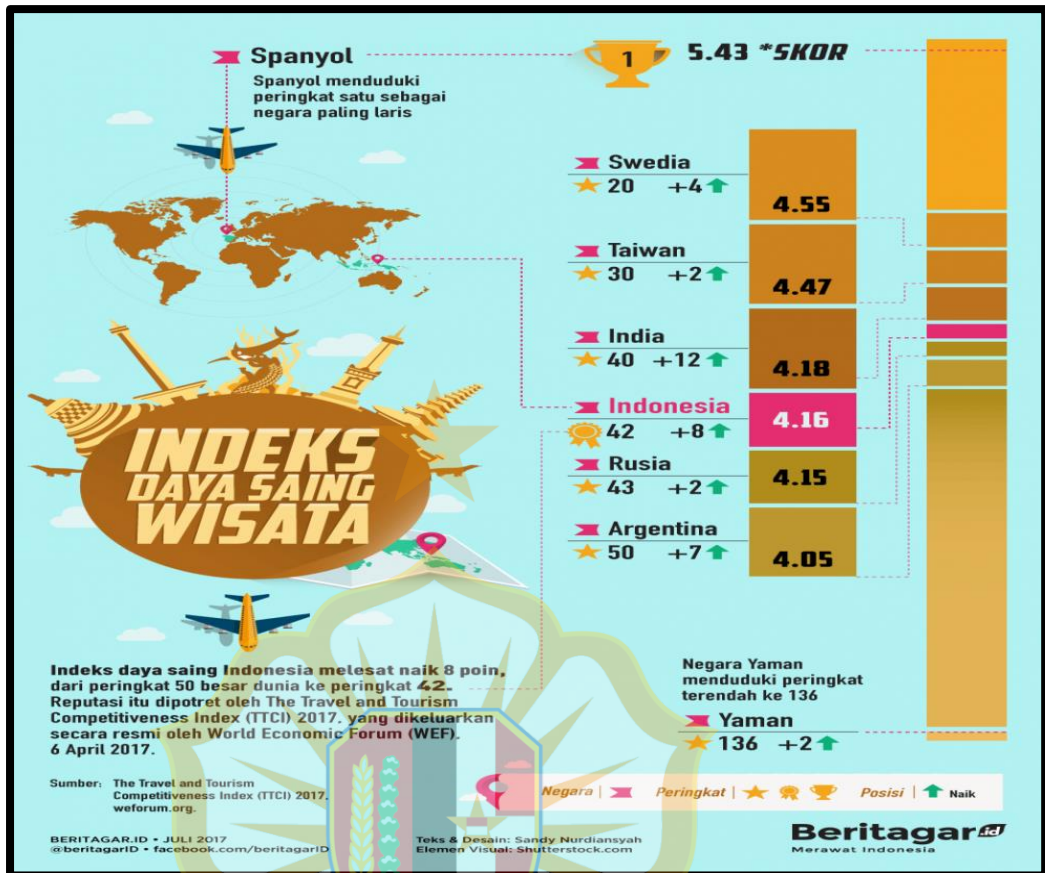
Banyaknya destinasi wisata baru yang ada saat ini belum menjadi daya tarik bagi turis mancanegara selain itu masih banyaknya persoalan di sektor pariwisata menjadi persoalan yang menghambat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, oleh karena daya saing pariwisata Indonesia masih belum optimal, adapun posisi daya saing pariwisata Indonesia meningkat ke peringkat 40 pada 2019 dari 42 pada tahun sebelumnya. Dalam laporan World Economic Forum (WEF) berjudul "The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019", skor daya saing wisata Indonesia sebesar 4,3. oleh karenanya Destinasi wisata Indonesia belum menjadi *top of mind* wisman.



<sup>19</sup> <https://eticon.co.id/pembangunan-pariwisata-berbasis-masyarakat/>



Gambar 5 :Indek Daya Saing Pariwisata



#### Sumber: Gambar Lokadata

Sektor industri pariwisata merupakan salah satu sektor usaha yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan tidak hanya antara stakeholder yang berkepentingan seperti pusat dan daerah tetapi juga sektor swasta dan masyarakat, oleh karena itu masih adanya ego sektoral dan tarik menarik kepentingan menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan pariwisata nasional, hal tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya regulasi serta adanya ketidak sinkronan regulasi pusat dan daerah pada sektor swasta, sehingga diperlukan kesadaran dan kemauan untuk duduk bersama menemukan titik tengah agar mendapatkan *win-win solution* dalam berbagai kebijakan pariwisata nasional.

Adapun upaya pemerintah menggenjot industri pariwisata guna meningkatkan devisa negara belum sejalan dengan perlindungan terhadap ekologi, slogan pariwisata yang berkelanjutan sudah seharusnya berbasis ekologi ternyata belum diperhatikan bahkan

terabaikan, hal ini dapat terlihat dari kerusakan ekologi lingkungan akibat pariwisata, tidak hanya kerusakan lingkungan ekologi sosial seperti adat istiadat dan kearifan lokal yang seharusnya menjadi daya tarik pariwisata justru terdegradasi oleh budaya asing selain itu perekonomian masyarakat juga tidak berkontribusi oleh sektor pariwisata sebagai akibat adanya monopoli oleh kartel atau pengusaha besar.

#### **11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.**

Perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional sudah barang tentu akan sangat mampu mempengaruhi upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dalam memantapkan ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan akan sangat berkaitan dengan lingkungan hidup, sosial budaya dan ekonomi masyarakat, oleh sebab itu diperlukan berbagai solusi untuk tetap menjaga keberlanjutan industri pariwisata sekaligus menjaga ekologi sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk itu diperlukan strategi, adapun strategi tersebut adalah mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan agar tetap menarik minat kunjungan turis mancanegara sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat khususnya devisa negara. Untuk itu sangat penting membahas lingkungan strategis sebagai bagian dari membaca kondisi dan menyusun strategi dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata di tingkat global yang berkontribusi bagi perekonomian nasional.

##### **a. Lingkungan Strategis Global.**

Berbagai konflik global terus terjadi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan global terutama adanya hegemoni Amerika dan China atas dunia yang mengarah kepada konflik bersenjata terutama di laut china selatan. Adanya perang dagang antara Amerika dan China telah berdampak besar terhadap perekonomian global termasuk perekonomian nasional. Oleh karenanya ditengah kondisi perekonomian global yang tidak

menentu, sektor pariwisata dapat menjadi solusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejak pemerintah menetapkan pariwisata sebagai *leading sector* serta sektor unggulan dalam mendukung perekonomian nasional melalui penerimaan pendapatan negara di luar pajak (devisa), maka sektor pariwisata dapat menjadi salah satu akses dalam meningkatkan perekonomian nasional, sebab sektor pariwisata merupakan industri yang tidak terdampak oleh perang dagang.

Seiring dengan itu kondisi global saat ini dihadapkan dengan wabah Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia dan berbagai dampak yang ditimbulkannya terutama terhadap sektor perekonomian bahkan saat ini sudah banyak negara memasuki jurang resesi sebagai implikasi dari wabah Covid-19.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani memaparkan dampak pandemi virus corona Covid-19 terhadap sektor perhotelan, restoran hingga sektor lainnya yang terkait pariwisata. Jika dikalkulasikan dari hasil pemaparannya, total kerugian yang dialami sektor ini mencapai Rp 85,7 triliun.<sup>20</sup>

Dari laporan yang dirilis oleh *World Tourism Organization*, adanya penurunan turis itu mencapai 44 persen apabila dibandingkan tahun lalu secara global. Kondisi tersebut sudah tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi sektor wisata, selain itu selama penanganan pandemi Corona-19 oleh pemerintah melalui PSBB sudah sekitar 95 persen pekerja sektor pariwisata yang dirumahkan dengan tidak menerima gaji.

Berdasarkan hasil dengar pendapat PHRI dan DPR disampaikan bahwa kerugian untuk sektor hotel itu adalah Rp 30 triliun, dan restoran itu Rp 40 triliun sampai dengan April yang lalu. Lalu, kerugian untuk maskapai penerbangan US\$ 812 juta (setara

<sup>20</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1365055/phri-sektor-pariwisata-rugi-rp-857-triliun-akibat-pandemi/full&view=ok> diakses tanggal; 4 oktober 2020

Rp 11,7 triliun/kurs Rp 14.460) dan untuk *tour operator* itu adalah Rp 4 triliun.

Selain kondisi global yang berimplikasi terhadap pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, sebelumnya sudah memiliki kesepakatan bersama terkait upaya mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan yang tertuang dalam (***Deklarasi Quebec tentang Ekowisata, 2002***), ini adalah deklarasi KTT Ekowisata Dunia, yang merupakan acara puncak Tahun Internasional Ekowisata, 2002, sebagaimana ditetapkan oleh PBB. Ini menetapkan rekomendasi, dari peserta dalam pertemuan puncak, kepada pemerintah, industri pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya, tentang berbagai langkah yang harus mereka ambil untuk mendorong pengembangan ekowisata. Sejumlah diantaranya termasuk rekomendasi tentang instrumen spesifik yang dipertimbangkan di tempat lain dalam publikasi ini. Deklarasi ini secara eksplisit mengakui relevansi pendekatan yang dikembangkan untuk ekowisata dengan tugas yang lebih luas untuk membuat semua pariwisata lebih berkelanjutan.

Kesepakatan global lainnya adalah (***KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan, Johannesburg, 2002***). Dalam rencana implementasinya, WSSD secara khusus menyerukan promosi pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu dari sejumlah strategi untuk melindungi dan mengelola basis sumber daya alam pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun tidak terlalu preskriptif, rencana tersebut (dalam Pasal 43) menekankan pada kerja sama internasional, bantuan teknis kepada masyarakat, manajemen pengunjung dan peningkatan akses pasar. Pengembangan pariwisata juga secara khusus disebut di antara langkah-langkah untuk pembangunan berkelanjutan negara-negara pulau kecil dan untuk Afrika, dan dalam kaitannya dengan pengelolaan energi dan konservasi keanekaragaman hayati.

**b. Lingkungan Strategis Regional.**

ASEAN sebagai Lembaga kerjasama regional Kawasan Asia Tenggara telah berkontribusi besar dalam setiap kehidupan dan kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dari mulai kerja sama ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan dan sosial, bahkan satu diantaranya yang terbaru adalah kesepakatan dalam penanganan wabah Covid-19 yang diantaranya berimplikasi kepada sektor pariwisata.

Melihat kondisi tersebut ASEAN bersepakat untuk bekerja sama dalam sektor pariwisata terutama dalam menghadapi wabah covid-19. Adapun kerjasama di tingkat ASEAN tersebut disepakati tujuh upaya kerja sama di bidang pariwisata sebagai upaya mitigasi terutama terhadap sektor yang paling terdampak oleh wabah Covid-19. Dalam pertemuan yang bertajuk *Special Meeting of the ASEAN Tourism Minister (M-ATM) on Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Sebelumnya beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara telah melaksanakan kerja sama pada sektor pariwisata dengan Indonesia, diantaranya Malaysia, hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan global terhadap sektor pariwisata ke dua negara dalam mengontrol Covid-19.

**c. Pengaruh Lingkungan Strategis Nasional**

Berdasarkan berbagai gatra-gatra Ketahanan Nasional (Astagatra), terdapat berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan Pariwisata yang berkelanjutan guna memantapkan ketahanan ekonomi nasional.

**1) Geografi,** Bentuk wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan wilayah perairan memiliki banyak potensi wisata khususnya maritim yang belum terekplorasi saat ini hanya Bunaken dan Raja Ampat serta Giri Trawangan yang menjadi spot wisata bahari internasional, tidak hanya wilayah maritim, Indonesia juga memiliki potensi wisata alam pegunungan bahkan beberapa wilayah sudah ditetapkan oleh badan dunia sebagai Geopark, dengan 15



geopark nasional dan 4 geopark Global,<sup>21</sup> sehingga dapat menjadi potensi destinasi wisata yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

**2) Demografi** : jumlah penduduk Indonesia yang merupakan nomor 4 terbesar di dunia bahkan di akhir tahun 2020 mendapatkan bonus demografi harus dapat dimanfaatkan dalam sektor pariwisata melalui penguatan kualitas SDM, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat sebagai bagian yang tidak terlepas dari sektor wisata terutama dalam menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi lain menunjukkan masih rendahnya kualitas SDM dalam sektor pariwisata hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah SDM yang memiliki sertifikasi dalam sektor pariwisata, selain itu kesadaran masyarakat dalam sektor pariwisata masih rendah, kondisi tersebut berbeda dengan di Bali yang masyarakatnya memiliki kesadaran yang sangat besar dan baik dalam mendukung sektor pariwisata.

**3) Sumber Kekayaan Alam** : potensi sumber kekayaan alam khususnya hutan dan terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman yang sangat besar menjadi potensi yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia yang harus dikembangkan dan dikelola dengan baik sebagai bagian dari ekologi yang mendukung sektor pariwisata yang berkelanjutan, bahkan Indonesia memiliki 1/8 terumbu karang dunia.

**4) Politik.** Dukungan politis bagi sektor pariwisata masih sangat rendah atau belum optimal hal tersebut dapat terlihat dari rendahnya regulasi yang berkaitan dengan sektor pariwisata, padahal pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai sektor penerima devisa utama bagi Indonesia sehingga perlu dukungan politis melalui regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata.

---

<sup>21</sup> <https://kumparan.com/kumparansains/bertambah-8-lokasi-kini-indonesia-punya-15-geopark-nasional-1543575362974241419/full>, diakses tanggal 4 oktober 2020

**5) Ekonomi.** Upaya pemerintah mewujudkan pembangunan nasional yang dilandasi dengan pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu mendukung sektor pariwisata, upaya pengembangan pariwisata masih dihadapkan dengan kendala rendahnya pembangunan infrastruktur di wilayah destinasi wisata sehingga menjadi kendala tersendiri dalam pengembangan sektor wisata.

**6) Sosial Budaya.** Kondisi sosial budaya sebagai bagian dari faktor dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan memiliki peran cukup besar, terutama dalam kehidupan sosial budaya masyarakat seperti budaya dan kesadaran masyarakat, seperti di Bali, oleh karenanya daerah lain perlu mengembangkan upaya yang sama dengan provinsi bali dalam memperkuat hubungan sosial budaya dan pariwisata, daerah-daerah lain bahkan dapat mengembangkan industri pariwisata halal sebagai proyek unggulan wisata nasional apalagi Indonesia dikenal dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pariwisata halal saat ini bahkan berkembang di Thailand dan Jepang. Oleh karenanya Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan pariwisata berbasis sosial budaya.

**7) Hankam.** Stabilitas keamanan menjadi salah satu factor krusial yang akan mampu menarik kunjungan wisatawan, kondisi kamtibmas yang baik tentu akan memberikan kenyamanan terhadap kunjungan wisatawan, sebab faktor keamanan menjadi salah satu syarat bagi wisatawan dalam mengunjungi satu wilayah destinasi wisata. Secara umum *Institute for Economics & peace (IEP)* merilis index peringkat negara teraman di dunia dimana Indonesia berada pada 10 besar atau peringkat 9 negara teraman di dunia dengan index 89,<sup>22</sup> sehingga dapat berkontribusi dan mendukung pengembangan pariwisata.

---

<sup>22</sup> <https://akurat.co/infografis/id-309004-read-peringkat-negara-teraman-dunia-dimana-posisi-indonesia>

### BAB III PEMBAHASAN

#### 12. Umum

Berdasarkan penjelasan sekaligus uraian di atas, terutama pada bab sebelumnya, sehingga dapat dibahas secara lebih lanjut mengenai pengembangan Pariwisata secara berkelanjutan dalam rangka memantapkan ketahanan ekonomi nasional. Oleh karenanya pembahasan pada bab 3 ini dilandasi oleh berbagai kerangka teori yang ada, dengan tetap berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan berlaku dan berkaitan dengan pembahasan, dengan menganalisa berbagai data dan fakta yang ada serta pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang berkontribusi maupun memiliki implikasi terhadap pengembangan pariwisata secara berkelanjutan agar dapat diantisipasi berbagai persoalan yang mungkin timbul.

Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan sudah menjadi keharusan bagi semua pihak hal tersebut sebagai wujud implementasi pembangunan berkelanjutan, sebab pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah kesepakatan global sebagai sebuah upaya pembangunan suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang serta sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup, selain itu sektor pariwisata saat ini menjadi sama pentingnya dengan pengelolaan SKA bahkan menjadi leading sector dalam penerimaan devisa negara.

Sektor industri pariwisata merupakan kegiatan yang telah tumbuh sekitar 25 persen dalam 10 tahun terakhir. Bahkan saat ini menyumbang sekitar 10 persen dari kegiatan ekonomi dunia dan menjadi salah satu generator utama lapangan kerja. Akan tetapi disisi lain memiliki dampak besar pada lingkungan alam, lingkungan buatan, pada kesejahteraan dan budaya masyarakat lokal. Konsep pembangunan berkelanjutan telah



diterima secara luas sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Pariwisata dapat memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) berharap mendorong semua negara untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah/negara untuk pengembangan dan pengelolaannya sepenuhnya menganut prinsip-prinsip keberlanjutan. Demikian juga, kebijakan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan harus memperhitungkan sepenuhnya peluang yang ditawarkan oleh pariwisata.

Berbagai konvensi dan deklarasi internasional telah mengedepankan prinsip dan pedoman untuk pariwisata berkelanjutan dan pentingnya pariwisata dan keberlanjutannya digarisbawahi pada KTT Dunia 2002 tentang Pembangunan Berkelanjutan. Banyak negara menyatakan bahwa mereka mengejar, atau ingin mengejar, kebijakan untuk 'pariwisata berkelanjutan'. Terlepas dari minat ini, masih ada tingkat ketidakpastian tentang ruang lingkup dan prioritas untuk membuat pariwisata lebih berkelanjutan dan hanya sebagian penghargaan tentang bagaimana menerapkannya dalam praktik.

Pembangunan berkelanjutan dalam prosesnya memerlukan proses integrasi ekonomi dan ekologi melalui upaya perumusan paradigma dan arah kebijakan yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi para pelaku pembangunan dalam mengelola sumber daya seoptimal mungkin (Baiquni, M. 2002). Pengembangan pariwisata berkelanjutan di dunia berpedoman pada kode etik kepariwisataan. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata yang terdapat di Indonesia.

### **13. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Penerimaan Devisa Negara**

Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan hidup manusia menurut Kementerian Lingkungan Hidup (1990) pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi.<sup>23</sup>

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebuah upaya pembangunan suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang serta sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki ketahanan terhadap krisis, oleh karenanya keberadaan sektor ini dapat menjadi harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi. Pariwisata Berkelanjutan atau *Sustainable Tourism* adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk penambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif.

Maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor publik untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah *sustainable tourism* sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber-sumber atau aset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi dimasa depan.

Potensi geografi dan sumber kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, selama ini dunia mengenal Bali sebagai destinasi pariwisata di Indonesia yang kemudian mulai berkembang hingga Lombok dengan Gili trawangan, Bunaken dan Raja Ampat di Papua, berbagai destinasi wisata terus bermunculan bahkan setiap tahun kunjungan wisata mancanegara semakin meningkat.

---

<sup>23</sup> I Nyoman Sukra Akrida " Pariwisata berkelanjutan dalam [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/27853e1951c3f72a0e6e8a0be2a9ed30.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/27853e1951c3f72a0e6e8a0be2a9ed30.pdf)

Pemerintah melalui kementerian pariwisata terus berusaha menarik minat kunjungan turis mancanegara, bahkan hampir setiap tahun ada kenaikan jumlah kunjungan turis mancanegara ke Indonesia meskipun belum memenuhi target yang diharapkan, hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang hanya mencapai 16,1 juta sepanjang 2019. Walaupun terjadi kenaikan 1,9% dari tahun sebelumnya, jumlah tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yakni 18 juta kunjungan. Bahkan tidak hanya 2019, realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tidak pernah mencapai target dalam empat tahun terakhir. Jumlahnya kurang 500 ribu dan satu juta kunjungan pada 2016 dan 2017. Kekurangannya pun semakin melebar pada tahun 2018, yakni 1,2 juta kunjungan.<sup>24</sup>

Tidak tercapainya target kunjungan wisata serta belum optimalnya jumlah penerimaan negara dari sektor pariwisata disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan infrastruktur di setiap destinasi wisata terutama ketersediaan infrastruktur transportasi sehingga akses wisata menjadi sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi akibatnya jumlah kunjungan wisata menjadi kurang.

Tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara sudah barang tentu berbanding lurus dengan penerimaan negara bahkan dengan peningkatannya mampu mengalahkan pemasukan devisa yang bersumber dari SKA, yang sebelumnya menjadi andalan negara.

Melihat berbagai kondisi di atas maka sudah wajar apabila pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi sangat penting dalam meningkatkan devisa negara, serta pembangunan nasional, sehingga pemerintah menjadikan sektor pariwisata menjadi leading sektor penerimaan devisa negara.

Pariwisata memiliki *multiplier effect* yang besar sehingga pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara sebab mampu mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional, seperti peningkatan ekonomi akibat pembangunan sarana-

---

<sup>24</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/03/jumlah-kunjungan-turis-asing-2019-kembali-meleset-dari-target>

prasarana, peningkatan industri-industri baru, peningkatan hasil pertanian dan peternakan, memperluas produk lokal untuk lebih dikenal dunia internasional, dan peningkatan permintaan terhadap *Souvenir Goods*, *Art painting* dan *Handicrafts*, peningkatan perolehan devisa negara, pajak, pendapatan nasional.

Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional saat ini masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang berada pada no 4 negara di ASEAN setelah Singapura, Malaysia dan Thailand yang secara luas geografi dan potensi pariwisata sangat jauh dari Indonesia akan tetapi mampu menarik wisata mancanegara yang cukup, destinasi wisata domestik yang sudah dikenal oleh wisatawan mancanegara (wisman) seperti Pulau Bali, Bunaken serta Raja Ampat menjadi salah satu keunggulan obyek wisata nasional. Peningkatan kualitas dan akses menuju destinasi, penguatan data dan informasi serta peningkatan atraksi yang terintegrasi bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan devisa pariwisata nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pariwisata pendapatan devisa dari sektor pariwisata pada 2015 mencapai US\$ 12,23 miliar atau setara Rp 169 triliun. Jumlah tersebut berada di urutan ke empat sebagai penyumbang devisa terbesar pada 2015, di bawah migas, batu bara dan kelapa sawit. Kemudian pada 2019, pendapatan devisa dari pariwisata ditargetkan sebesar US\$ 20 miliar dan menjadi yang terbesar mengalahkan hasil ekspor sawit maupun migas. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menargetkan 20 juta kunjungan wisman pada 2019 meskipun target ini ternyata tidak tercapai.<sup>25</sup>

Upaya meningkatkan sekaligus memaksimalkan penerimaan devisa dari pariwisata masih dihadapkan dengan berbagai hambatan, tantangan, dan kendala antara lain :

**Pertama** belum optimalnya infrastruktur pariwisata, persoalan destinasi pariwisata tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur

<sup>25</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/10/berapa-pendapatan-devisa-dari-sektor-pariwisata-indonesia>. (diakses tanggal 3 oktober 2020)

bahkan pemerintah dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan infrastruktur pariwisata bahkan fokus pariwisata ini juga terlihat dari alokasi anggaran untuk pariwisata yang direncanakan sebesar Rp 4,95 triliun dalam RAPBN 2020 atau meningkat dari perkiraan realisasi (outlook) APBN 2019 yang sebesar Rp 3,89 triliun.<sup>26</sup>

Infrastruktur sebagai struktur dan fasilitas fisik yang dikembangkan oleh badan pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam menyediakan air, sumber tenaga, penanganan limbah, transport dan layanan sejenisnya untuk memfasilitasi pencapaian tujuan sosial dan ekonomi.

Peranan infrastruktur merupakan elemen pendukung kegiatan perkotaan. Prasarana perlu disediakan dalam suatu kota karena prasarana merupakan kebutuhan dasar (basic needs) dan prasarana dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor pariwisata sangat terkait dan bergantung pada perkembangan infrastruktur yang tersedia. Peran infrastruktur menjadi sangat penting karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia, akan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata.

Banyaknya jumlah destinasi pariwisata secara otomatis memerlukan upaya pembangunan infrastruktur yang banyak dan didukung ketersediaan anggaran yang besar, oleh karenanya pemerintah jangan hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur destinasi wisata unggulan seperti seperti Pulau Bali, Bunaken serta Raja Ampat.

Beberapa infrastruktur yang menjadi sangat penting bagi perkembangan sektor pariwisata yaitu infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, bandara, jalan raya, moda transportasi umum, dan lahan parkir, ketiadaan infrastruktur tersebut sudah tentu menyebabkan terbatasnya akses ke destinasi wisata, akibatnya kunjungan wisatawan rendah, selain itu kurangnya sarana dan prasarana maupun infrastruktur

---

<sup>26</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190820153746-4-93360/jokowi-mau-genjot-infrastruktur-pariwisata-buat-apa-sih>



di tempat wisata seperti penerangan, akses komunikasi, fasilitas air bersih, aliran listrik dan masih banyak lagi.

**Kedua** Terbatasnya konektivitas, ketersediaan infrastruktur transportasi dan konektivitas menjadi salah satu faktor pendukung untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia terutama dihadapkan dengan kondisi geografi Indonesia yang tersebar dalam bentuk kepulauan akan sangat membutuhkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana yang akan mampu mempermudah akses sekaligus mendorong kedatangan wisatawan, tidak hanya itu belum adanya akses transportasi walaupun ada hanya yang bersifat angkutan perintis sudah tentu akan menyebabkan besarnya biaya yang dibutuhkan dan waktu yang lama, selain itu keterbatasan akses transportasi sudah barang tentu akan menghambat akses barang dan jasa sehingga akan mendorong biaya akibatnya harga barang dan jasa di kawasan destinasi wisata akan sangat tinggi menyesuaikan dengan pengeluaran biaya akomodasi.

Ketersediaan penerbangan dan pelayaran sebagai transportasi sangat dibutuhkan dalam membuka akses transportasi oleh karenanya tidak hanya infrastruktur namun moda transportasi sangat penting dalam membuka akses keterisoliran wilayah sekaligus sebagai pintu gerbang kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

**Ketiga** Rendahnya Inovasi dan birokrasi, salah satu daya tarik wisatawan adalah dengan adanya berbagai inovasi sektor pariwisata, hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kejenuhan atau kebosanan akan tetapi memberikan daya tarik tersendiri, sebagaimana telah diterapkan oleh Singapura yang memiliki berbagai inovasi menarik meskipun tidak memiliki banyak destinasi wisata seperti di Indonesia, belum optimalnya inovasi pariwisata justru akan melahirkan keengganan bagi turis untuk datang kembali, karena itu inovasi pariwisata sangat penting guna membangun daya tarik destinasi wisata seperti menyatukan wisata alam dan budaya atau wisata alam dan wisata kuliner, atau berinovasi dengan berbagai kerajinan yang menarik.

Disisi lain persoalan birokrasi menjadi salah satu faktor penghambat kunjungan wisata ke Indonesia. Menurut Kemendagri dalam acara *trisakti tourism Award and conference* di JCC mengatakan bahwa rumitnya proses birokrasi menjadi penyebab tidak berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia.<sup>27</sup>

Untuk menjawab tiga persoalan tersebut di atas secara bersamaan maka dapat menggunakan pisau analisis teori konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup (*well being*) masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan.

Adapun **solusi-solusi** tersebut antara lain: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan aspek ekologi serta kelestarian lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, kemudian dengan keterbatasan ketersediaan anggaran pemerintah dapat mengundang investor baik dari luar maupun dari dalam negeri untuk berinvestasi dengan membangun infrastruktur pariwisata nasional, sekaligus berinvestasi dalam menyediakan moda transportasi, selain itu pemerintah dapat melibatkan masyarakat sebagai unsur ekologis dengan memberikan lapangan pekerjaan dari setiap proyek pengembangan infrastruktur. Selain itu pemerintah melalui Kemenhub harus fokus dalam membangun transportasi dan moda angkutan untuk mendukung Pengembangan Pariwisata yang berkelanjutan, melalui perencanaan yang matang. Tidak hanya mengundang investor asing pemerintah dapat mengundang pemerintah negara lainnya untuk melakukan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor transportasi.

Selain itu pemerintah melibatkan masyarakat dan swasta khususnya kaum milenial untuk mampu berinovasi di sektor swasta agar dapat menarik kunjungan pariwisata, seperti membangun desa wisata , desa

---

<sup>27</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/930072/mendagri-sebut-rumitnya-birokrasi-penyebab-pariwisata-tidak-berkembang>



kuliner, kuliner halal, sehingga memiliki daya tarik tersendiri selain itu pemerintah juga perlu mempermudah birokrasi sektor pariwisata seperti mempermudah kunjungan wisata dengan cukup memiliki visa, kemudian mempermudah birokrasi bagi investor di bidang industri pariwisata sehingga mampu mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus penerimaan devisa.

Pemerintah bersama dengan otoritas terkait akan meningkatkan keragaman kemudahan akses dan inovasi berupa atraksi dan kualitas amenities (3A). "3A yang sudah ada tersebut kemudian didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (2P)". Dengan berbagai peningkatan akses sekaligus kualitas layanan, maka akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata, terutama untuk destinasi wisata prioritas

#### **14. Mewujudkan sinergi antara stakeholders yang berkepentingan pada sektor pariwisata**

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor utama pengembangan nasional melalui target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Pariwisata menjadi sektor unggulan yang diharapkan diikuti oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Daerah-daerah di Indonesia memiliki potensi pariwisata yang diharapkan mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat melalui kegiatan pariwisata. Target pemerintah tersebut tidak hanya menjadi tugas sekelompok anggota masyarakat, tetapi melibatkan berbagai unsur sehingga dibutuhkan sinergi antara berbagai kelompok masyarakat yang ada di suatu wilayah geografis atau destinasi wisata.

Menteri Pariwisata Republik Indonesia menekankan pentingnya target pariwisata dalam lima tahun ke depan yakni kenaikan dua kali lipat dengan kontribusi PDB nasional sebesar 8% dengan devisa sebesar Rp. 280 triliun. Kunjungan wisatawan yang meningkat sebagaimana yang

ditargetkan tersebut diharapkan mampu mendorong ketersediaan lapangan kerja bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang. Hal ini dimaknai sebagai pentingnya melibatkan berbagai unsur yang ada untuk membantu tercapainya sasaran pengembangan pariwisata nasional.

Satu hal yang nampaknya masih menjadi kelemahan utama dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia adalah bahwa pada umumnya setiap orang atau kelompok dalam masyarakat ingin menjadi pemeran utama. Ibarat sebuah tim sepak bola, setiap pemain merasa berhak dan berkewajiban untuk menjadi pencetak gol atau penyerang utama (striker). Sudah tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang mustahil untuk dilaksanakan. Tidak semua pemain harus menjadi penyerang utama, namun harus diingat bahwa tanpa para pemain pendukung, seorang penyerang utama sehebat apapun tidak akan memenangkan pertandingan.

Filosofi permainan sebuah tim sepak bola sangat penting untuk diterapkan di dalam kepariwisataan, karena fenomena ini sifatnya sangat multidimensi. Kepariwisataan pada dasarnya adalah sebuah konsep abstrak yang merupakan gabungan dari berbagai unsur pendukung dan membentuk sebuah sistem.

Artinya, para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata sejak awal harus sudah memahami bahwa sektor ini tidak akan dapat berjalan dengan sendirinya tanpa dukungan dari berbagai sektor lain. Oleh karena itu, di tingkat kebijakan selalu muncul ungkapan bahwa sektor pariwisata tidak punya "barangnya", karena yang memiliki "barangnya" adalah sektor lain seperti transportasi, kehutanan, pertanian dan sebagainya

Adanya ketidakberhasilan pemerintah untuk mencapai target kunjungan wisata yang telah ditetapkan bahkan selama lima tahun berturut-turut sejak 2015 sampai 2019 kesemuanya tidak mencapai target yang telah ditentukan bahkan target pendapatan dari sektor pariwisata sebesar 20 jt wisatawan di 2019 tidak terpenuhi menunjukkan adanya ketidak sinergisan antara pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

Pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan sudah barang tentu akan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan baik

pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat, maupun akademisi, oleh karenanya sebagai program yang diunggulkan sudah seharusnya ditata atau dikelola sejak dini sehingga tidak menimbulkan ketidakharmonisan

Menteri Pariwisata Republik Indonesia menggunakan istilah pentaheliks pariwisata yang terdiri dari *academics, business, government, community, media* (ABGCM) untuk mendorong keterlibatan *stakeholder* dalam program pengembangan destinasi wisata. Namun, belum terdapat data empiris mengenai bagaimana sinergi yang terbangun antara unsur pentaheliks pariwisata

Karena itu, dibutuhkan model sinergi yang dapat menjadi panduan dalam mengelola potensi pariwisata daerah dalam menunjang tercapainya destinasi unggulan. Sinergi pentaheliks pariwisata telah terbangun meskipun program kerja bidang pariwisata lebih didominasi oleh pemerintah daerah. Keterlibatan pentaheliks pariwisata sangat dibutuhkan untuk mendukung program pengembangan pariwisata daerah.

Pengembangan pariwisata tentunya akan banyak berkaitan dengan jasa adanya nilai finansial sudah barang tentu akan mendorong lembaga untuk saling menguasai setiap proyek yang ada akibatnya timbul tarik ulur kepentingan, seperti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah didiberikan keleluasan dengan UU Otonomi daerah, sehingga diberikan kewenangan dalam pengelolaan daerah termasuk sektor pariwisata, oleh karenanya perlu diselaraskan setiap program pengembangan pariwisata yang berkelanjutan antara pusat dan daerah.

Kurangnya pemahaman teknologi dan pariwisata oleh beberapa pentaheliks pariwisata serta lemahnya upaya kreatif dan inovatif di bidang pariwisata menjadi tantangan dalam pengelolaan destinasi wisata. Adapun hambatan dan tantangan sekaligus kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sinergi antara stakeholders adalah sebagai berikut:

**Pertama** belum terbangunnya *grand design* pengembangan pariwisata berkelanjutan, saat ini sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan bahkan menjadi penghasil devisa terbesar oleh

karenanya pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan sudah seharusnya memiliki grand design untuk mempermudah arah pengembangan kepariwisataan.

Grand design pengembangan pariwisata menjadi sangat penting agar mampu mendorong arah pengembangan pariwisata berkelanjutan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder yang berkewenangan agar mampu saling bersinergi dengan memahami peran dan fungsi sekaligus memahami siapa berbuat apa sehingga tidak menimbulkan tarik ulur kepentingan yang dapat menimbulkan gesekan yang dapat menghambat setiap upaya pengembangan pariwisata. Disisi lain sektor pariwisata selama ini kurang menerapkan program pariwisata berkelanjutan berbasis ekologi yang seharusnya mengadopsi dari pembangunan berkelanjutan sehingga akan tetap mampu menjaga keberlangsungan ekologis.

Grand design sektor pariwisata sebagai rencana induk akan mampu memberikan arahan strategis dan pengelolaan secara komprehensi dan holistik mengenai pengembangan pariwisata serta mampu memetakan berbagai potensi pariwisata sekaligus memuat berbagai peluang dan kendala serta persoalan, tantangan dan hambatan yang dihadapi, lebih jauh penyusunan grand design pariwisata diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang berbasis ekologi.

**Kedua** belum optimalnya kerjasama, secara kelembagaan, dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai sumber devisa negara, oleh karenanya kementerian pariwisata diberikan amanat untuk dapat mengelola pariwisata sekaligus menjadi leading sektor meskipun dalam perjalanannya pengelolaan pariwisata belum berjalan optimal dihadapkan dengan berbagai kendala dan dukungan kerjasama dengan kementerian serta lembaga lain yang seakan berjalan masing-masing sehingga belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam pengembangan pariwisata oleh karenanya peranan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah serta unsur lainnya sangat diharapkan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis ekologi, yang saat

belum terbangun kerjasama ataupun harmonisasi antara stakeholder pariwisata, baik secara kelembagaan maupun regulasi.

Adapun upaya pemerintah dalam mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis ekologi untuk dapat mewujudkan pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang mampu menjaga ekologi secara bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya seharusnya sudah terealisasi oleh sebab itu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kemendikbud, KKP sangat penting untuk saling bersinergi dalam menjaga ekologi yang didalamnya terdapat aspek lingkungan hidup, SDM, sosial ekonomi masyarakat dalam mencegah serta meminimalisir dampak kerusakan dari sektor pariwisata yang sekaligus akan meningkatkan daya tarik pariwisata dengan terjaganya kelestarian ekologi untuk tetap mewujudkan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

Belum adanya ikatan kerja sama dan belum optimalnya koordinasi dan harmonisasi akan menghambat upaya kerjasama dalam membangun sinergitas. Selain itu disisi lain upaya pengembangan pariwisata melalui penta heliks dengan melibatkan pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat sehingga mampu mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis ekologis guna memantapkan ketahanan ekonomi nasional.

Untuk dapat menganalisa berbagai persoalan, tantangan dan kendala di atas maka dapat menggunakan pisau analisis teori sinergitas, dimana dengan adanya kerjasama dan sinergitas akan mampu menghasilkan suatu hal lebih baik dan lebih optimal, sinergitas antara pemangku kepentingan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi.

Adapun solusi-solusi dari hasil pembahasan persoalan dengan menggunakan pisau analisis antara lain sebagai berikut:

**Pertama** pemerintah melalui Kementerian Pariwisata sebagai leading sektor dalam bidang pariwisata menyusun grand design pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan terutama Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, KKP,



pemerintah daerah, akademisi, swasta atau pengusaha dan masyarakat. Untuk saling memberikan masukan saran , menyusun perencanaan program selama 5 tahun kedepan serta program-program bersama dalam mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata melaksanakan Round Table Discussion (RTD) dengan para pemangku kepentingan serta melaksanakan Forum group Discussion dengan para ahli dan pakarnya untuk menerima masukan dan saran dalam mendukung kinerja dan program Kementerian Pariwisata.

**kedua** Kementerian Pariwisata selaku leading sector menyusun MOU kerja sama di bidang pengembangan pariwisata dengan kementerian yang terkait, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM, pelestarian lingkungan hidup serta pelestarian kawasan maritim selain itu pemerintah melakukan kerja sama dengan pentahelik melakukan kajian atau penelitian terkait pengembangan pariwisata berbasis ekologi atau dampak wisata terhadap ekologi serta upaya yang perlu dilakukan, selanjutnya kementerian pariwisata membangun pengembangan pariwisata berbasis ekonomi masyarakat, dan melakukan kerjasama dengan sektor bisnis dengan membuka investasi di sektor pariwisata. Selain itu, Dinas Pariwisata di daerah bekerja sama dengan masyarakat membangun destinasi wisata, baik budaya, tradisi, kuliner dll. Kementerian Pariwisata bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mencari dan membangun destinasi wisata dengan melibatkan masyarakat.

#### **15. Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan berbasis ekologi**

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam, dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahan juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi lingkungan, dan pelibatan masyarakat setempat sekitar Daerah Tujuan Ekowisata dalam pengelolaannya.



- a. Aspek ekologi, terkait daya dukung lingkungan dimana daya dukung lingkungan akan mempresentasikan kemampuan lingkungan untuk mendukung kegiatan pariwisata. Daya dukung menjadi alat untuk menentukan ambang batas atau daya dukung kawasan terhadap aspek tertentu yang berkaitan dengan pariwisata.
- b. Aspek ekonomis, pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam bidang ekonomi harus mampu menguntungkan masyarakat lokal, wisatawan, dan pelaku bisnis pariwisata dalam daya tarik wisata
- c. Aspek sosial budaya, kondisi sosial budaya lokal masyarakat yang dapat dikembangkan dalam kegiatan ekowisata serta kemungkinan dampak negatif yang akan diterima dan cara mengatasinya. Keberlanjutan dalam bidang sosial budaya, dimana diharapkan masyarakat lokal berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata dan dalam membuatnya lebih berkelanjutan. Tingkat keterlibatan pemerintah dalam pariwisata sangat bervariasi di seluruh dunia. Namun, kontak dengan pemerintah mengenai keberlanjutan mengungkapkan bahwa sebagian besar, setidaknya secara nominal, berupaya mengejar pariwisata berkelanjutan. Ini berlaku sama untuk negara maju dan berkembang, meskipun penekanannya mungkin berbeda. Di Indonesia minat terhadap pariwisata berkelanjutan lebih cenderung dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan dan pendanaan konservasi; di negara maju, masalah peremajaan dan manajemen pengunjung lebih menonjol.

Fungsi utama pemerintah dalam membina pariwisata yang lebih berkelanjutan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan atau mempengaruhi sektor swasta untuk beroperasi lebih berkelanjutan dan memengaruhi pola arus dan perilaku pengunjung sehingga memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif pariwisata.

Alasan utama pentingnya peran pemerintah adalah sebagai berikut: Pemerintah bertanggung jawab atas banyak fungsi yang secara fundamental penting bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan,

seperti perencanaan penggunaan lahan, peraturan ketenagakerjaan dan lingkungan, dan penyediaan infrastruktur dan layanan sosial dan lingkungan. Selanjutnya, secara aktif terlibat dalam mendukung pariwisata melalui pemasaran, layanan informasi, pendidikan dan dengan cara lain, seringkali melalui kerangka kerja publik-swasta bersama. Fungsi-fungsi ini perlu dilanjutkan dan diselaraskan lebih erat dengan tujuan keberlanjutan.

Adapun Tantangan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain:

**Pertama** kecerdasan pariwisata masyarakat, kecerdasan pariwisata merupakan kesadaran masyarakat di suatu negara atau wilayah dalam mengelola dan memberdayakan segala potensi wisatanya untuk menarik para turis. Perilaku masyarakat yang ramah turis dan obyek wisata yang dikemas secara menarik merupakan wujud kecerdasan pariwisata menjadi modal utama Indonesia dalam memajukan kecerdasan pariwisata.

Dengan memajukan kecerdasan pariwisata secara serius, Indonesia akan mampu untuk berhasil menciptakan destinasi wisata “baru” yang menarik wisatawan global untuk datang. Bahkan tidak hanya terbatas pada destinasi wisata unggulan tersebut, bahkan destinasi lainnya pun akan perlahan bermunculan dan menjadi unggulan. Dan dengan demikian Indonesia akan memiliki daya saing dan optimis untuk memenangkan persaingan ekonomi diantara negara dunia, adanya kecerdasan pariwisata akan membangun kesadaran individu dalam membangun pariwisata di daerahnya, sebagai contoh kesadaran masyarakat bali dapat dikatakan sangat baik dalam tingkat kecerdasan pariwisata, bagaimana memanfaatkan potensi alam, sosial budaya dan tradisi, sehingga menarik untuk dijadikan destinasi wisata, kecerdasan pariwisata saat ini semakin berkembang saat terutama oleh kelompok milenial dengan menciptakan destinasi wisata seperti desa wisata, akan tetapi kecerdasan ini dirasa belum optimal terutama di daerah luar jawa, diperlukan campur tangan pemerintah ataupun swasta. Bahkan negara

singapura saat ini memanaatkan kecerdasan buatan dalam memulihkan sektor pariwisatanya.

**kedua** adanya kerusakan lingkungan, meskipun saat ini konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis ekologi yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, sosial budaya, namun kenyataannya dampak pariwisata terhadap kerusakan lingkungan seakan diabaikan, bahkan pembangunan resort, hotel telah merusak ekosistem hutan, dan pantai, kemudian adanya kegiatan wisata maritime telah menimbulkan kerusakan terumbu karang, serta limbah-limbah akibat pariwisata, hal ini tentu bertolak belakang dengan konsep pariwisata berkelanjutan, sehingga diperlukan kesadaran tidak hanya wisatawan tetapi para pengusaha dan pekerja di industri pariwisata untuk mau menjaga ekosistem yang ada.

**ketiga** belum optimalnya aspek sosial budaya dimana menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan adat yang ada di masyarakat dan berkontribusi untuk meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman antar-budaya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi dari para stakeholder terkait serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan adanya partisipasi yang aktif dan kesepakatan antar stakeholder.

Mengacu kepada teori pembangunan berkelanjutan maka dapat dianalisis berbagai persoalan, hambatan dan tantangan diatas yang memerlukan solusi antara lain:

**Pertama** membangun kecerdasan pariwisata tidak lagi berbasis individu tetapi harus melibatkan dan berbasis masyarakat untuk berinovasi dan saling berkontribusi melahirkan destinasi wisata baru yang berbeda sehingga akan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan oleh organisasi, LSM pariwisata serta oleh pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata, membentuk kelompok kelompok binaan pariwisata di setiap daerah

bahkan meningkatkan pelatihan dan sertifikasi untuk pendamping turis, membangun kecerdasan pariwisata berbasis masyarakat harus dilakukan secara komprehensif dan holistic dimana memiliki kesadaran untuk menjaga dan memelihara, nilai budaya serta lingkungan.

**Kedua** mengantisipasi berbagai dampak pariwisata terhadap lingkungan haruslah melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, dimana pemerintah melalui pemda melakukan pembinaan sekaligus pengawasan kepada pengusaha pariwisata, selain itu dengan membangun kesadaran masyarakat agar lebih menyadari akan kelestarian lingkungan.

**Ketiga** menjaga dan melestarikan nilai sosial budaya dan adat-istiadat sebagai bagian destinasi budaya, konsep pariwisata budaya di Bali berhasil menjaga dan melindungi adat istiadat bahkan menjadi bagian destinasi wisata, begitu juga setiap daerah memiliki nilai budaya serta adat istiadat, oleh karenanya pemerintah harus melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh budaya serta tokoh agama dalam membangun pariwisata seperti dengan membangun destinasi pariwisata halal, selain itu dengan tetap menjaga berbagai kearifan lokal yang ada.

## **16. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia di tingkat Regional dan global**

Dalam Laporan dari *Tourism Competitiveness Report* bahwa sejumlah faktor dan kebijakan yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan dari sektor perjalanan & pariwisata yang pada gilirannya, berkontribusi pada pembangunan dan daya saing negara adapun peringkat indeks daya saing pariwisata Indonesia di dunia naik menjadi peringkat 40 di tahun 2019 dari peringkat 42 di tahun 2017. Di tingkat global Indonesia berada di peringkat 40 dari 140 negara, sedangkan di kawasan Asia Tenggara, indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di peringkat empat.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> <https://travel.kompas.com/read/2019/09/05/173751627/indeks-daya-saing-pariwisata-indonesia-tahun-2019-naik?page=all> di akses tanggal 3 oktober 2020

Perubahan kenaikan ini disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan kedatangan turis asing ke Indonesia, prioritas nasional untuk industri pariwisata dan investasi infrastruktur (misalnya jaringan telepon seluler sekarang menjangkau sebagian besar negara, dan transportasi udara tersebar luas.) Laporan tersebut menyatakan keunggulan kompetitif Indonesia antara lain harga bersaing, kekayaan sumber daya alam (keanekaragaman hayati), dan keberadaan sejumlah situs cagar budaya.

Namun, laporan tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia kurang memperhatikan kelestarian lingkungan (mengakibatkan deforestasi hutan dan spesies yang terancam punah, sementara hanya sebagian kecil dari air limbah yang diolah). Laporan tersebut juga membahas masalah keselamatan dan keamanan, terutama kerugian bisnis akibat terorisme<sup>29</sup>. Serangkaian serangan teroris yang ditujukan untuk menyerang para pendatang dari negara Barat (Bom Bali 2002/2005 dan Bom Ritz-Carlton / Marriott 2009 di Jakarta) berhasil menghadang kedatangan turis asing karena banyak turis asing. Sebagai tujuan wisata pada bulan-bulan setelah insiden kekerasan ini perlu waktu untuk bisa pulih kembali. Kejadian Bom Ritz-Carlton/Marriott pada tahun 2009 menjelaskan mengapa pertumbuhan kedatangan wisatawan pada tahun 2009 terbatas. Setelah tahun 2009 tidak ada serangan teroris, keberhasilan ini berkat upaya pasukan khusus anti-terorisme negara (Densus 88) yang disponsori oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan dilatih oleh CIA, FBI, dan Dinas Rahasia AS.

Kerisauan lainnya adalah Indonesia tertinggal dari Singapura (peringkat 11), Malaysia (peringkat 25), dan Thailand (peringkat 35) dalam *Travel & Tourism Competitiveness Report 2015*. Kurangnya infrastruktur yang layak di Indonesia merupakan masalah yang terus berlanjut, tidak hanya karena hal itu sangat meningkatkan biaya logistik yang membuat iklim investasi kurang menarik tetapi juga mengurangi kelancaran pariwisata. Infrastruktur di Bali sangat baik dan di Jakarta cukup baik (kecuali untuk kemacetan besar) tetapi di luar Bali dan Jakarta sebagian

---

<sup>29</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051>



besar infrastruktur di dalam negeri buruk, terutama di kawasan timur Indonesia karena kurangnya bandara, pelabuhan, jalan dan hotel. Kurangnya konektivitas di dalam dan antar pulau membuat banyak wilayah di Indonesia memiliki potensi wisata yang tidak dapat diakses dengan mudah.

Selain infrastruktur, pendidikan juga menjadi kendala. Demikian halnya di pulau Bali dan hotel-hotel mewah di Jakarta sebagian besar penduduk asli yang bekerja di sektor pariwisata cukup fasih berbahasa Inggris (dan bahkan bahasa asing lainnya), namun di daerah yang lebih terpencil penduduk asli kesulitan berkomunikasi dengan wisatawan. Oleh karena itu, berfokus pada belajar bahasa Inggris akan membantu mengatasi situasi ini. Kendala penguasaan bahasa asing inilah yang menjadi alasan mengapa sebagian orang Singapura lebih memilih Malaysia daripada Indonesia sebagai tujuan wisata mereka. Sebagian besar wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia berasal dari Singapura disusul Malaysia dan Australia.

Industri pariwisata kini merupakan industri penting sebagai penyumbang Gross Domestic Product (GDP) suatu negara oleh karenanya pemerintah pusat harus mendorong setiap pemerintah daerah untuk mengeksplorasi destinasi wisata sebagai objek destinasi wisata hal ini sudah barang tentu akan memberikan keuntungan bagi daerah, industri ini sebagai penyokong dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Industri ini mampu memberikan kontribusi lebih dari 10% dari PAD. Hal inilah yang menyebabkan daerah berlomba-lomba untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang dimilikinya sehingga dapat menarik kunjungan wisata (turis) baik lokal maupun mancanegara. Berkembangnya sektor ini akan membawa dampak yang cukup besar pada industri-industri yang terkait seperti hotel, rumah makan, biro travel dan UKM di daerah-daerah kunjungan wisata, dengan meningkatnya daya saing pariwisata di tingkat daerah maka akan berkontribusi sekaligus mendorong daya saing sektor pariwisata nasional di tingkat global.



Adapun Tantangan, hambatan yang dihadapi antara lain:

**Pertama** daya saing regional dan global dalam laporan World Economic Forum (WEF) berjudul "*The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019*", skor daya saing wisata Indonesia sebesar 4,3. sektor pariwisata Indonesia di tingkat ASEAN berada di posisi ke 4 setelah Thailand, Malaysia dan peringkat pertama Singapura, apabila melihat dari faktor geografi, kemudian demografi, sosial budaya bahkan potensi SKA seharusnya Indonesia mampu menduduki peringkat pertama, indeks daya saing pariwisata yang disusun WEF mengukur beberapa faktor dan kebijakan yang memungkinkan perkembangan keberlanjutan sektor terkait. Hal ini menjadi acuan pada perkembangan dan daya saing sebuah negara.

Indeks ini diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti lingkungan, kebijakan dan kondisi yang mendukung, infrastruktur, sumber daya alam dan budaya.

Menurut Presiden Jokowi menyampaikan, dalam indeks daya saing pariwisata, Indonesia memiliki lima keunggulan dibandingkan negara lain. Yakni daya saing harga, prioritas kebijakan, daya tarik alam, keterbukaan, serta daya tarik budaya dan kunjungan bisnis.

Meski demikian, Indonesia memiliki sejumlah kekurangan di beberapa hal, di antaranya kesehatan dan kebersihan destinasi wisata serta infrastruktur pariwisata. Mengacu kepada teori pembangunan berkelanjutan maka dapat dianalisis berbagai persoalan, hambatan dan tantangan diatas yang memerlukan solusi antara lain

Untuk dapat meningkatkan tingkat daya saing pariwisata sudah tentu tidak cukup satu atau dua indicator saja akan tetapi seluruh indikator harus terus ditingkatkan adapun solusi dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata di tingkat regional dan global antara lain melalui

**Solusi Pertama** Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing melalui sektor pariwisata. Terutama meningkatkan daya saing melalui pengembangan pariwisata daerah. Pariwisata daerah adalah kunci utama dari sektor pariwisata global, yang terhitung merupakan 73% dari

pengeluaran perjalanan dan pariwisata di tahun 2017. Pemerintah sendiri mengembangkan pariwisata daerah sebagai salah satu bentuk untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur dan mengurangi tekanan dari kepadatan berlebih melalui, misalnya, kebijakan penetapan harga tanpa pertimbangan dan pemberian manfaat wisata non-upah.

**Kedua** pemerintah mendorong peningkatan daya saing pada level daerah untuk saling bersaing melalui peningkatan infrastruktur, kebersihan dll, selain itu pemerintah memberikan subsidi kepada daerah untuk meningkatkan destinasi wisata dan mendorong pembangunan pariwisata yang memiliki ciri khas sesuai daerahnya.

**Ketiga** solusi ini secara khusus sudah diuraikan dipersoalan sebelumnya, solusi itu antara lain: Perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk percepatan realisasi infrastruktur; yang didukung sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan; serta pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi perluasan cakupan promosi pariwisata Indonesia;

**Keempat** Pembangunan jaringan integrasi transportasi antar destinasi wisata antar wilayah dengan menjadikan pelabuhan dengan dengan comparative advantage. Disertai akses pelabuhan udara dan inrastruktur transportasi lainnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **17. Simpulan**

Pengembangan pariwisata saat ini telah menjadi sumber devisa yang lebih diunggulkan dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, hal ini dikarenakan sektor pariwisata dapat menjadi pemicu dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Oleh karenanya setiap negara saat ini terus meningkatkan industri pariwisata dalam rangka peningkatan penerimaan negara. Kondisi wabah Covid-19 yang menjadi pandemi global saat ini cukup memukul sektor pariwisata, akan tetapi berbagai upaya dilakukan oleh semua negara termasuk Indonesia untuk kembali membangkitkan sektor pariwisata.

- a. Pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan devisa negara, dimana saat ini sektor pariwisata telah menjadi sumber utama penerimaan negara (devisa negara), sehingga untuk mewujudkan peningkatan pengembangan pariwisata perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur berbagai destinasi wisata untuk membuka akses wisata di seluruh wilayah sehingga meningkat angka kunjungan wisatawan yang akan berbanding lurus dengan penerimaan devisa negara.
- b. Mewujudkan sinergi antara stakeholders yang berkepentingan pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berbasis ekologi pengembangan pariwisata melibatkan banyak stakeholder seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kemendikbud, KKP, Pemda dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas SDM sektor pariwisata sekaligus dengan tetap menjaga ekosistem oleh karena sinergitas menjadi sangat penting untuk dapat mengembangkan pariwisata berkelanjutan
- c. Pengembangan Sektor Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Ekologi Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan maka pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus memperhatikan berbagai aspek ekonomi, lingkungan hidup dan aspek sosial budaya

- d. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia di tingkat regional dan global. Peningkatan daya saing pariwisata di tingkat global maupun regional harus diawali dari perbaikan berbagai indikator seperti infrastruktur, kebersihan, kelestarian lingkungan, serta kesadaran pariwisata. Selanjutnya, peningkatan daya saing pariwisata harus dilakukan dari tingkat daerah untuk dapat mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia baik di tingkat global maupun regional.

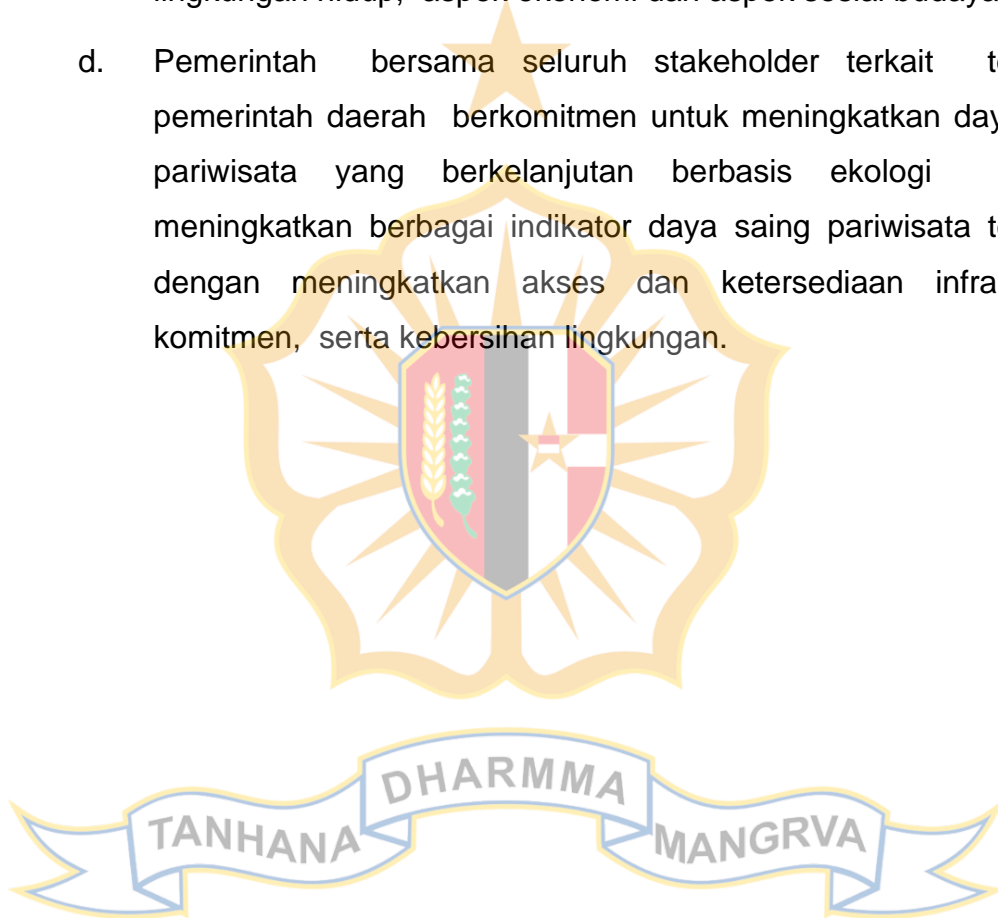
## 18. Rekomendasi

Pengembangan sektor pariwisata berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Dinamisme dan pertumbuhan sektor ini juga memberikan kontribusi besar pada perekonomian banyak negara dan tujuan lokal. Pariwisata adalah kegiatan yang melibatkan hubungan khusus antara konsumen (pengunjung), industri, lingkungan dan masyarakat setempat. Keberlanjutan adalah tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pariwisata. Sebagian besar dampak pariwisata adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan wisatawan itu sendiri. Bagi pemerintah diharapkan untuk mengambil peran utama bagi kemajuan yang ingin dicapai dalam membuat pariwisata lebih berkelanjutan. Oleh karena itu beberapa hal dapat direkomendasikan untuk pemerintah dan pelaku usaha industri pariwisata untuk lebih berperan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, sebagai berikut:

- a. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata bersama Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah serta stakeholder lainnya untuk meningkatkan pendanaan infrastruktur baik melalui APBN maupun dengan membuka akses investasi infrastruktur sektor pariwisata.
- b. Kementerian Pariwisata menyusun grand design pengembangan pariwisata yang berkelanjutan bersama K/L/P untuk meningkatkan kerjasama dan bersinergi dalam pengembangan pariwisata, selain itu pemerintah membuka akses melalui Pentahelix dalam mendorong pengembangan pariwisata dengan mendorong sektor

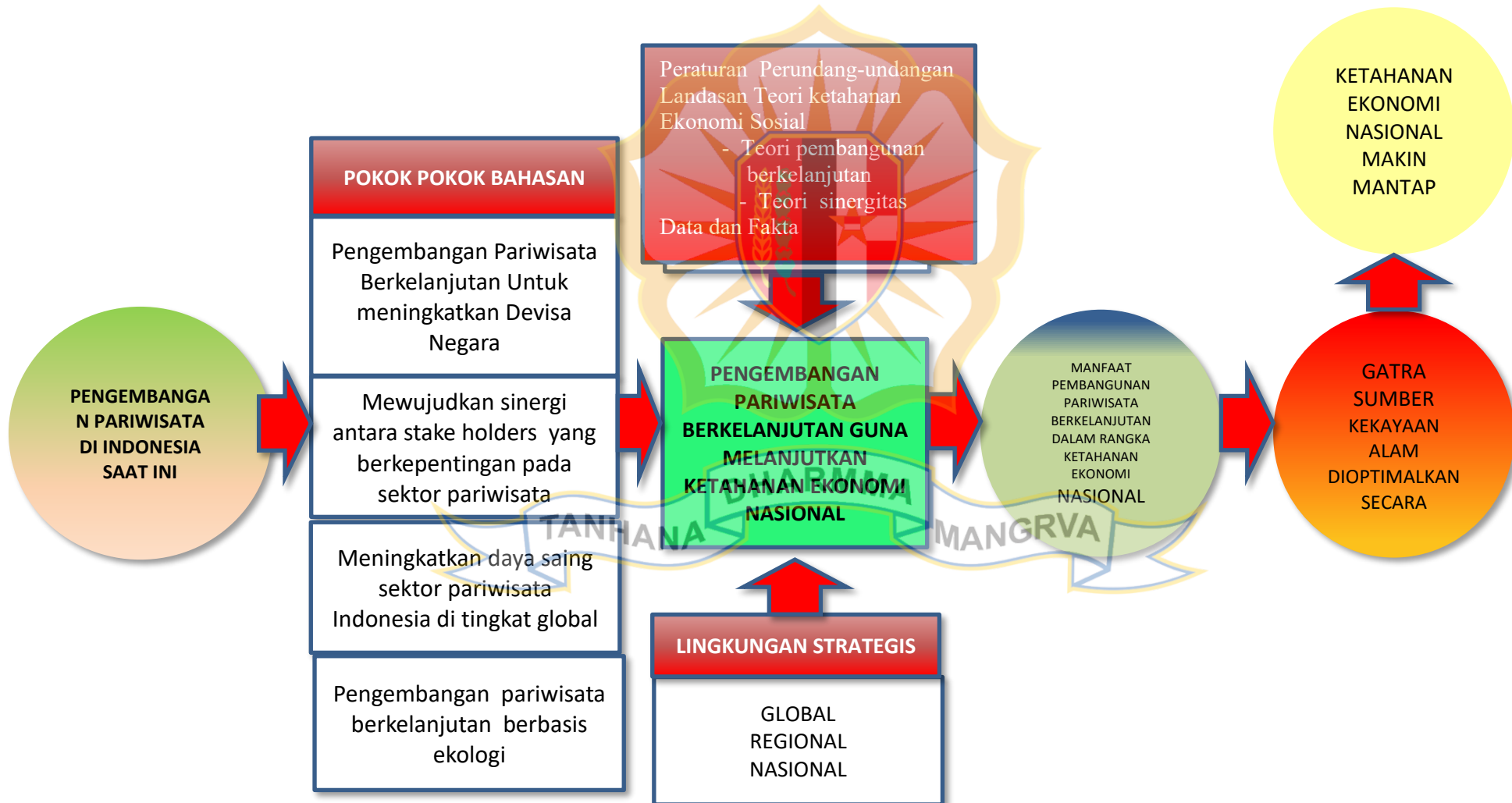
swasta, wisatawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menanggapi masalah keberlanjutan. Kementerian Pariwisata bersama Kemendikbud memasukan Pendidikan sadar wisata dalam kurikulum Pendidikan Dasar

- c. Pemerintah bersama sektor swasta dan masyarakat bersama sama untuk berkomitmen mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan berbasis ekologi, yang meliputi aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya.
- d. Pemerintah bersama seluruh stakeholder terkait terutama pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing pariwisata yang berkelanjutan berbasis ekologi dengan meningkatkan berbagai indikator daya saing pariwisata terutama dengan meningkatkan akses dan ketersediaan infrastruktur, komitmen, serta kebersihan lingkungan.



## ALUR PIKIR

### PENGEMBANGAN PARIWISATA SECARA BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MEMANTAPKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL







## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU REFERENSI

Badan Pusat Statistik. 26 Juni 2020. Katalog 8401011 *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2019*.

Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*.

Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 39, 528–546.

Harding, A. and Blokland, T. (2014). *Urban Theory : A critical introduction to power, cities, and urbanism in the 21st century*.

Soemarwoto, Otto. 2001. *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

### JURNAL ILMIAH

Baiquni, M. 2002. "Integrasi Ekonomi dan Ekologi dari Mimpi Menjadi Aksi," dalam *Wacana*, III, 12.

Bramwell, B., & Lane, B. (2012). Towards innovation in sustainable tourism research? *Journal of Sustainable Tourism*, 20(1), 1–7.

Hall, C. M. (2011). Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance: From first- and second-order to third-order change? *Journal of Sustainable Tourism*, 19, 649–671.

I Nyoman Sukra Akrida "Pariwisata berkelanjutan dalam [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_dir/27853e1951c3f72a0\\_e6e8a0be2a9ed30.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/27853e1951c3f72a0_e6e8a0be2a9ed30.pdf) (diunduh 23-8-2020, jam 25.30 wita)

*Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, Dampak Ekowisata Bahari Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan Pesisir, diakses dari <file:///C:/Users/SULTHA~1/AppData/Local/Temp/586-83-PB.pdf>. (diunduh 22-08-2020, jam 10.00 wita)

Kapera, I. (2018) Sustainable tourism development efforts by local governments in *Poland*. *Journal of Sustainable Cities and Society*, Volume 40, 581-588.

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2488>

<http://e-journal.uajy.ac.id/15514/3/TS150202.pdf> (diunduh 27-09-2020, jam 19.35 wita)

United Nation World Tourism Organization. "Glossary of Tourism Terms". <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms>. 11 Mei 2020.

World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future*. Oxford:Oxford University.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata.

Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Undang-undang RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

## SUMBER LAINNYA

Akbar Pandu Dwinugraha sinergitas aktor kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa  
<file:///C:/Users/SULTHA~1/AppData/Local/Temp/1421-3675-2-PB-2.pdf>

Badan Pusat Statistik, Mengulik Data Suku Di Indonesia.  
<https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>.

<https://akurat.co/infografis/id-309004-read-peringkat-negara-teraman-dunia-dimana-posisi-indonesia>

<https://bisnis.tempo.co/read/1365055/phri-sektor-pariwisata-rugi-rp-857-triliun-akibat-pandemi/full&view=ok> diakses tanggal; 4 oktober 2020

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/10/berapa-pendapatan-devisa-dari-sektor-pariwisata-indonesia> diakses tanggal 3 oktober 2020

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/03/jumlah-kunjungan-turis-asing-2019-kembali-meleset-dari-target> diakses tanggal 3 oktober 2020

<https://ekbis.sindonews.com/berita/1388557/34/indonesia-adopsi-standar-global-dalam-program-pariwisata-berkelanjutan>

<https://eticon.co.id/pembangunan-pariwisata-berbasis-masyarakat/>

<https://kbbi.kata.web.id/daya-saing/>

<https://kbbi.kata.web.id/ekologi>

<https://kbbi.web.id/perkembangan>

<https://kumparan.com/kumparansains/bertambah-8-lokasi-kini-indonesia-punya-15-geopark-nasional-1543575362974241419/full>, diakses tanggal 4 oktober 2020

<https://travel.kompas.com/read/2019/09/05/173751627/indeks-daya-saing-pariwisata-indonesia-tahun-2019-naik?page=all> diakses tanggal 3 oktober 2020

<https://travel.kompas.com/read/2019/09/06/114334127/menpar-sumringah-posisi-indonesia-di-peringkat-pariwisata-dunia-naik?page=all> (diakses tanggal 3 oktober 2020)

<https://www.antaraneews.com/berita/930072/mendagri-sebut-rumitnya-birokrasi-penyebab-pariwisata-tidak-berkembang> di akses tanggal 3 oktober 2020

<https://www.beritasatu.com/anselmus-bata/gaya-hidup/585877/pacu-dunia-pariwisata> diakses tanggal 4 Oktober 2020

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190820153746-4-93360/jokowi-mau-genjot-infrastruktur-pariwisata-buat-apa-sih> di akses tanggal 4 oktober 2020

<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051> di akses tanggal 4 oktober 2020

Indonesia.go.id, Mengejar Wisatawan Premium di 2020.

<https://www.indonesia.go.id/ragam/pariwisata/ekonomi/mengejar-wisatawan-premium-di-2020> . 3 Februari 2020.